



LAPORAN BADAN PANGAN NASIONAL PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

**BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, SEPTEMBER
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi tambahan anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 Badan Pangan Nasional melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 9.500.429.523.000. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-13 Nomor: **SP DIPA- 125.01.1.690590/2024** tanggal 22 Agustus 2024, sehingga total alokasi anggaran menjadi sebesar **Rp. 25.222.891.455.000**. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Agustus Tahun 2024 untuk mendorong penggunaan anggaran seefisien dan seefektif mungkin.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, data dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional periode bulan Agustus Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional periode bulan Agustus Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 7 September 2024
Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Metode Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	11
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	19
3.3 Kegiatan Kepala Badan Periode Bulan Agustus Tahun 2024	91
BAB IV PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Permasalahan	101
4.3 Rekomendasi	102

DAFTAR TABEL



Tabel 1	Pagu Blokir Sampai Bulan Agustus Sesuai DIPA Revisi ke-13 Badan Pangan Nasional Tahun 2024	3
Tabel 2	Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Sesuai DIPA Revisi Blokir AA Tahun 2024.....	4
Tabel 3	Target Fisik dan Keuangan Bulan Agustus Tahun 2024 Sesuai DIPA Revisi ke-10 Badan Pangan Nasional	5
Tabel 4	Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan Agustus Tahun 2024.....	11
Tabel 5	Realisasi Keuangan dan Fisik Bulan Agustus Tahun 2024 Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional	12
Tabel 6	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Posisi Sampai Bulan Agustus Tahun 2024	18
Tabel 7	Realisasi Keuangan Bulan Agustus Tahun 2024 Per Kegiatan Lingkup Badan Badan Pangan Nasional	19

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1. Lampiran III DIPA Revisi ke-13 Badan Pangan Nasional TA 2024 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan	109
Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Fisik Badan Pangan Nasional Periode Agustus Tahun 2024	110

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, amanat ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022. Sebagaimana pasal 5 pada perbadan tersebut, Kepala Badan perlu melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik, Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I (UKE-1) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; 3) pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan dinamika perencanaan, kegiatan tersebut dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan 55 (lima puluh lima) Rincian Output (RO) berdasarkan DIPA revisi 13 Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 untuk Badan Pangan Nasional (125.01) melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 25.222.891.455.000 (Dua Puluh Lima Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, sesuai dinamika anggaran yang telah di laporkan pada periode bulan Agustus Tahun 2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran selama bulan Agustus Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional posisi bulan Agustus Tahun 2024. Sesuai target pada bulan Agustus sebesar 24,36% atau sebesar Rp. 6.143.630.539,- dari total anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 25.222.891.455.000,- (Dua Puluh Lima Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).



Penetapan target berdasarkan lembar ke-III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2024 Revisi ke-13 tanggal 22 Agustus Tahun 2024.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan output kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Agustus Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Agustus Tahun 2024. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Agustus Tahun 2024 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Badan Pangan Nasional Tahun 2024 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan Agustus Tahun 2024.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Agustus Tahun 2024.

1.3 Metode Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari kinerja outcome di level Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama Tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan alokasi ABT Tahun 2024, telah terbit Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 nomor SP.DIPA-125.01.1.690590/2024 Revisi ke-13 Tanggal 22 Agustus 2024. Rencana kinerja output pada bulan Agustus Tahun 2024 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai halaman III DIPA Revisi ke-13 Tahun 2024. Sebagaimana lembar ke-III DIPA Revisi ke-13 pada bulan Agustus ditargetkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.143.630.539,- atau 24,36% dari total pagu sebesar Rp. 25.222.891.455.000,- (Dua Puluh Lima Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan periode laporan Agustus terdapat alokasi anggaran yang masih di blokir sebesar Rp.22.431.086.000,- dengan rincian per kegiatan pada Tabel 1 dan alokasi anggaran sesuai pagu DIPA Revisi ke-13 dan pagu revisi blokir sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1.
Pagu Blokir Sampai Bulan Agustus Sesuai DIPA Revisi Ke-13
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU BLOKIR (Rp)
JUMLAH SELURUHNYA		22.431.086.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	19.544.148.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.292.278.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5.177.606.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.074.264.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.886.938.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.886.938.000

Tabel 2.
Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Bulan Agustus Sesuai
DIPA Revisi ke-13 dan Revisi Blokir AA Tahun 2024

URAIAN		PAGU	
		DIPA	REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		25.222.891.455.000	25.200.760.369.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.109.921.237.000	25.090.377.089.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.006.798.781.000	24.998.506.503.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	47.588.014.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	44.282.572.000
WA	Program Dukungan Manajemen	112.970.218.000	110.383.280.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.970.218.000	110.383.280.000



Laporan Badan Pangan Nasional Periode Bulan Agustus tahun 2024 khusus akan melaporkan pencapaian kinerja Satker Pusat (690590) Badan Pangan Nasional dengan target pada periode bulan Agustus sebagaimana dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Target Fisik dan Keuangan Bulan Agustus Sesuai DIPA Revisi ke-13
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REV-13 2024		TARGET BULAN AGUSTUS	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (24,36 %)	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		25.222.891.455.000		6.144.296.358.438	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.109.921.237.000		6.116.776.813.333	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.006.798.781.000		6.091.656.183.052	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.080.798.000	18 rekomendasi	994.082.393	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	1 rekomendasi	235.492.505	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	12 rekomendasi	272.607.888	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.995.000.000	5 rekomendasi	485.982.000	2
AEA	Koordinasi	18.657.126.000	3 Kegiatan	4.544.875.894	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	1 Kegiatan	99.108.660	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	7.267.323.000	1 Kegiatan	1.770.319.883	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.982.953.000	1 Kegiatan	2.675.447.351	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000	26 NSPK	706.774.950	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REV-13 2024		TARGET BULAN AGUSTUS	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (24,36 %)	FISIK
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	6 NSPK	121.647.750	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	9 NSPK	317.167.200	1
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	11 NSPK	267.960.000	1
BEC	Bantuan Produk	24.935.632.477.000	125601122 paket	6.074.320.071.397	
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	24.935.632.477.000	125601122 paket	6.074.320.071.397	52527761
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000	75 kel. Kelompok	365.400.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	75 kel. Kelompok	365.400.000	10
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	25.577.005.000	13 Layanan	6.230.558.418	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	9.074.585.000	3 Data	2.210.568.906	0
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14.920.340.000	9 Data	3.634.594.824	1
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	1 Data	385.394.688	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000	17 unit	4.494.420.000	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	12 Unit	4.007.220.000	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	5 Unit	487.200.000	0
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000		12.853.705.032	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	11.350.000.000	13 Rekomendasi	2.764.860.000	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan ngendalian Kerawanan Pangan	4.123.000.000	1 Rekomendasi	1.004.362.800	0

ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	7.227.000.000	12 Rekomendasi	1.760.497.200	1
AEA	Koordinasi	19.295.020.000	2 Kegiatan	4.700.266.872	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.700.000.000	1 Kegiatan	1.388.520.000	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	13.595.020.000	1 Kegiatan	3.311.746.872	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	978.450.000	8 NSPK	238.350.420	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4 NSPK	97.440.000	0
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	578.450.000	4 NSPK	140.910.420	0
QEA	Bantuan Masyarakat	18.611.550.000	180.001 Orang	4.533.773.580	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	14.525.000.000	180.000 Orang	3.538.290.000	0
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	1 orang	995.483.580	0
QMA	Data dan Informasi Publik	2.530.600.000	2 Data	616.454.160	
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.275.000.000	1 Data	310.590.000	0
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	1 Data	305.864.160	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000		12.266.925.250	0

ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.498.400.000	11 rekomendasi	608.610.240	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	300.000.000	3 rekomendasi	73.080.000	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.198.400.000	8 rekomendasi	535.530.240	3
AEA	Koordinasi	24.506.811.000	20 Kegiatan	5.969.859.160	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	8.702.742.000	11 Kegiatan	2.119.987.951	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	11.271.222.000	8 Kegiatan	2.745.669.679	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.532.847.000	1 Kegiatan	1.104.201.529	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2.250.000.000	13 NSPK	548.100.000	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	650.000.000	4 NSPK	158.340.000	0
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	7 NSPK	341.040.000	3
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	2 NSPK	48.720.000	0
PCA	Perizinan Produk	1.712.000.000	400 Produk	417.043.200	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.712.000.000	400 Produk	417.043.200	82

PEH	Promosi	5.044.000.000	1 Kegiatan	1.228.718.400	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	5.044.000.000	1 Kegiatan	1.228.718.400	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.270.000.000	6 kelompok masyarakat	552.972.000	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.270.000.000	6 kelompok masyarakat	552.972.000	0
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000	1 Laporan	553.660.170	
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	1 Laporan	553.660.170	0
QMA	Data dan Informasi Publik Publik	1.460.000.000	1 Data	355.656.000	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.460.000.000	1 Data	355.656.000	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.342.800.000	8 Unit	2.032.306.080	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	8.342.800.000	8 Unit	2.032.306.080	0
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	112.970.218.000		27.519.545.105	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.970.218.000		27.519.545.105	
AEC	Kerjasama	2.900.000.000	1 Dokumen	706.440.000	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.900.000.000	1 Dokumen	706.440.000	0
BMA	Data dan Informasi	5.248.080.000	1 Layanan	1.278.432.288	
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	5.248.080.000	1 Layanan	1.278.432.288	0

EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	83.805.778.000	7 Layanan	20.415.087.521	
EBA.956	Layanan BMN	720.000.000	1 Layanan	175.392.000	0
EBA.957	Layanan Hukum	1.700.000.000	1 Layanan	414.120.000	0
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.500.000.000	1 Layanan	852.600.000	0
EBA.959	Layanan Protokoler	975.000.000	1 Layanan	237.510.000	0
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.000.000.000	1 Layanan	243.600.000	0
EBA.962	Layanan Umum	11.755.630.000	1 Layanan	2.863.671.468	0
EBA.994	Layanan Perkantoran	64.155.148.000	1 Layanan	15.628.194.053	0
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.926.400.000	40 Unit	469.271.040	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.926.400.000	40 Unit	469.271.040	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.600.000.000	342 Orang	876.960.000	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.600.000.000	342 orang	876.960.000	0
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.489.960.000	34 Dokumen	3.773.354.256	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.923.960.000	15 Dokumen	1.443.076.656	2
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	6 Dokumen	243.600.000	0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	1 Dokumen	477.943.200	0
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.604.000.000	12 Laporan	1.608.734.400	0

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Keuangan dan Fisik

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 55 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 25.222.891.455.000,-**. Alokasi anggaran tambahan melalui DIPA Revisi ke-13 Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2024 pertanggal 22 Agustus 2024, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar **Rp. 9.500.429.523.000,-** (Sembilan Triliun Lima Ratus Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), sehingga total alokasi anggaran di Badan Pangan Nasional menjadi **Rp.25.222.891.455.000,-** untuk pelaksanaan 55 output/RO lingkup Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan output/rincian output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Agustus Tahun 2024 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan per belanja dan realisasi fisik bulan Agustus tahun 2024 per output lingkup Badan Pangan Nasional disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4.

Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan Agustus Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	48.599.711.000	34.991.315.187	72,00
2.	Belanja Barang	25.120.233.609.000	6.535.740.739.008	26,02
3.	Belanja Modal	31.927.049.000	3.283.436.591	10,28
TOTAL		15.700.030.846.000	6.574.015.490.786	41,87

Tabel 5.
Realisasi Keuangan dan Fisik Bulan Agustus Tahun 2024
Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional

URAIAN		TARGET BULAN AGUSTUS		REALISASI BULAN AGUSTUS		
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	%	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		6.144.296.358.438		6.086.071.987.615	99,05	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.116.776.813.333		6.077.442.927.869	99,36	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	6.091.656.183.052		6.063.674.544.583	99,54	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	994.082.393		335.980.780	33,80	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	235.492.505	1 rekomendasi	61.602.321	26,16	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	272.607.888	1 rekomendasi	28.401.300	10,42	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	485.982.000	2 rekomendasi	245.977.159	50,61	2
AEA	Koordinasi	4.544.875.894		1.720.558.894	37,86	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	99.108.660	0 Kegiatan	69.817.290	70,45	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	1.770.319.883	1 Kegiatan	1.412.889.151	79,81	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	2.675.447.351	0 Kegiatan	237.852.453	8,89	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	706.774.950		484.681.023	68,58	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	121.647.750	1 NSPK	115.493.100	94,94	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	317.167.200	1 NSPK	30.315.000	9,56	1
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	267.960.000	1 NSPK	338.872.923	126,46	1

URAIAN		TARGET Bulan AGUSTUS		REALISASI		
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	%	FISIK
BEC	Bantuan Produk	6.074.320.071.397		6.058.872.011.073	99,75	
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	6.074.320.071.397	52527761 paket	6.058.872.011.073	99,75	52527761
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	365.400.000		106.608.856	29,18	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	365.400.000	10 kelompok	106.608.856	29,18	2
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	6.230.558.418		2.141.143.700	34,37	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	2.210.568.906	0 Data	311.772.200	14,10	0
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.634.594.824	1 Data	1.795.246.500	49,39	1
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	385.394.688	1 Data	34.125.000	8,85	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.494.420.000		13.560.257	0,30	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	4.007.220.000	12 Unit	13.560.257	0,34	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	487.200.000	5 Unit	0	0	0
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12.853.705.032		8.822.902.194	68,64	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.764.860.000		1.609.018.955	58,20	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.004.362.800	1 rekomendasi	163.559.712	16,28	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.760.497.200	1 rekomendasi	1.445.459.243	82,11	1
AEA	Koordinasi	4.700.266.872		2.080.777.277	44,27	

URAIAN		TARGET Bulan Maret		REALISASI		
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	%	FISIK
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.388.520.000	0 Kegiatan	409.044.990	29,46	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3.311.746.872	0 Kegiatan	1.671.732.287	50,48	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	238.350.420		30.897.748	12,96	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	97.440.000	4 NSPK	30.897.748	31,71	0
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	140.910.420	4 NSPK	0	0	5
QEA	Bantuan Masyarakat	4.533.773.580		4.955.824.545	109,31	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	3.538.290.000	0 orang	4.716.223.045	13,29	0
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	995.483.580	1 orang	239.601.500	24,07	0
QMA	Data dan Informasi Publik	616.454.160		146.383.669	23,75	
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	310.590.000	0 Data	100.401.597	32,33	0
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	305.864.160	0 Data	45.982.072	15,03	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	12.266.925.250		4.945.481.092	40,32	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	608.610.240		2.200.400.000	361,55	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	73.080.000	0 rekomendasi	152.000.000	207,99	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	535.530.240	3 rekomendasi	2.048.400.000	382,50	3
AEA	Koordinasi	5.969.859.160		22.919.912.000	383,93	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2.119.987.951	1 Kegiatan	7.922.818.000	373,72	1

AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	2.745.669.679	0 Kegiatan	2.285.789.583	83,25	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1.104.201.529	0 Kegiatan	389.714.170	35,29	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	548.100.000		110.989.882	20,25	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	158.340.000	0 NSPK	0	0	0
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	341.040.000	3 NSPK	101.989.882	29,91	3
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	48.720.000	0 NSPK	9.000.000	18,47	0
PCA	Perizinan Produk	417.043.200		227.087.853	54,45	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	417.043.200	82 Produk	227.087.853	54,45	162
PEH	Promosi	1.228.718.400		518.748.120	42,22	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	1.228.718.400	0 Kegiatan	518.748.120	42,22	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	552.972.000		356.015.462	64,38	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	552.972.000	6 Kelompok Masyarakat	356.015.462	64,38	0

URAIAN		TARGET Bulan AGUSTUS		REALISASI		
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	%	FISIK
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	553.660.170		284.402.279	51,37	0
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	553.660.170	0 Laporan	284.402.279	51,37	0
QMA	Data dan Informasi Publik	355.656.000		13.238.299	3,72	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	355.656.000	0 Data	13.238.299	3,72	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.032.306.080		0		
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.032.306.080	0 unit	0	0	0
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	27.519.545.105		8.629.059.746	31,36	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	27.519.545.105		8.629.059.746	31,36	
AEC	Kerjasama	706.440.000		265.581.364	31,36	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	706.440.000	0 Dokumen	265.581.364	37,59	0
BMA	Data dan Informasi	1.278.432.288		397.888.921	31,12	
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	1.278.432.288	0 Layanan	397.888.921	31,12	0
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.415.087.521		6.684.403.357	32,74	
EBA.956	Layanan BMN	175.392.000	0 Layanan	62.720.418	35,76	0
EBA.957	Layanan Hukum	414.120.000	0 Layanan	56.391.230	13,62	0
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	852.600.000	0 Layanan	343.635.465	40,30	0
EBA.959	Layanan Protokoler	237.510.000	0 Layanan	6.888.676	2,90	0
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	243.600.000	0 Layanan	31.050.000	12,75	0
EBA.962	Layanan Umum	2.863.671.468	0 Layanan	1.113.682.485	38,89	0
EBA.994	Layanan Perkantoran	15.628.194.053	0 Layanan	5.070.035.083	32,44	0



EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	469.271.040		0	0	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	469.271.040	0 unit	0	0	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	876.960.000		390.137.812	44,49	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	876.960.000	0 orang	390.137.812	44,49	0
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.773.354.256	2 Dokumen	891.048.292	23,61	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.443.076.656	2 Dokumen	454.748.701	31,51	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	243.600.000	0 Dokumen	0	0	0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	477.943.200	0 Dokumen	211.508.935	44,25	0
EBD.965	Layanan Audit Internal	1.608.734.400	0 Laporan	224.790.656	13,97	0

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa target bulanan menjadi sangat kecil karena Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) volume anggarannya meningkat dari DIPA awal sebesar Rp. 9.500.429.523.000 menjadi 25.222.891.455.000. Hal tersebut akan berimbas terhadap target serapan bulanan secara keseluruhan terutama Badan, sedangkan untuk masing-masing kegiatan (Deputi) punya target serapan masing-masing kegiatan sehingga target dan realisasinya mendekati persen normal, kecuali Deputi I (Deputi yang menerima ABT sebesar > 9 T), tetapi pada saat target per kegiatan disandingkan dengan target Badan secara keseluruhan menyebabkan angka menjadi ribuan persen karena target badan kecil dibanding target kegiatan mengikuti pagunya masing-masing yang cenderung normal.

Sebagaimana Tabel 5 di atas, output kegiatan Fisik yang ter-realisis pada bulan Agustus Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk KRO: a) ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Pangan untuk RO Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan, RO Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan RO Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan, b) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Pelaporan untuk RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan, Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan Koordinasi Distribusi dan Cadangan Pangan, c) AFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk RO NSPK Ketersediaan Pangan, RO NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan; d) BEC Bantuan Produk untuk RO Penyaluran Bantuan Pemerintah, e) QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk RO Pangan yang Terdistribusi, dan f) QMA Data dan Informasi Publik untuk RO Data dan Informasi Ketersediaan Pangan, RO Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan, dan RO Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan.
2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk KRO: a) ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan untuk RO Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan, dan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi b) AEA Koordinasi untuk RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan, dan RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, c) AFA Norma, Standar, Prodsedur, dan Kriteria (NSPK) untuk RO NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan, d) QEA Bantuan Masyarakat untuk RO Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan, dan RO Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, e) Data dan Informasi Publik untuk RO Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, dan RO Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk KRO: a) ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan untuk RO Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan RO Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan b) AEA Koordinasi untuk RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dan RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan c) AFA Norma, Standar, Prodsedur, dan Kriteria (NSPK) untuk RO NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Ikan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan, dan RO NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, d) PCA Perizinan Produk untuk RO Perijinan, e) PEH Promosi untuk RO Promosi pangan B2SA, f) QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk RO Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, g) QIA Pengawasan dan pengendalian produk untuk RO pengawasan, h) QMA Data dan Informasi Publik untuk RO Data Situasi Konsumsi Pangan.

Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan bulan Agustus mencapai Rp 6.086.071.987.615,- atau 24,15% berdasarkan pagu Revisi dan 2,59% berdasarkan pagu DIPA. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional
Posisi sampai bulan Agustus Tahun 2024

URAIAN		PAGU		REALISASI		
		DIPA	REVISI	SP2D	%DIPA	%REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		25.222.891.455.000	25.200.760.369.000	6.574.015.490.786	26,06%	26,09%
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.109.921.237.000	25.090.377.089.000	6.505.152.127.144	25,91%	25,93%
HA.687 5	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.506.869.258.000	24.998.506.503.000	6.454.333.329.949	41,62%	25,82%
HA.687 6	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	47.588.014.000	21.727.491.991	41,18%	45,66%
HA.687 7	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	44.282.572.000	29.091.305.204	57,77%	65,69%



WA	Program Dukungan Manajemen	112.470.218.000	110.383.280.000	68.863.363.642	61,23%	62,39%
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.470.218.000	110.383.280.000	68.863.363.642	61,23%	62,39%

Target anggaran bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp. 6.144.296.358.438,- realisasi anggaran sebesar 99,05% atau setara Rp. 6.086.071.987.615,- Rincian per kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7.
Realisasi Keuangan Bulan Agustus Tahun 2024
Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pangan Nasional	6.144.296.358.438	6.086.071.987.615	99,05
6875. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	6.091.656.183.052	6.063.674.544.583	99,54
6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12.853.705.032	8.822.902.194	68,64
6877. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	12.266.925.250	4.945.481.092	40,32
WA6874. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	27.519.545.105	8.629.059.746	31,36

Dari Tabel 7 di atas, realisasi keuangan tertinggi pada kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan capaian 99,54%. Hal ini disebabkan karena terlaksananya penyaluran cadangan pemerintah, sedangkan kegiatan lainnya secara realisasi keuangan sudah berjalan terutama untuk penyiapan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Agustus Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 7, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp. 6.063.674.544.583,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

1.1. Direktorat Ketersediaan Pangan dengan kegiatan:

1. Pemantauan Kegiatan Monitoring Stok Pangan (Simonstok) di Kab. Temanggung, Magelang dan Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan pemantauan stok pangan di Jawa Tengah dilaksanakan pada 1-3 Agustus 2024 dalam rangka untuk memverifikasi sampel SIMONSTOK di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Semarang. Hasilnya adalah:

Kabupaten Temanggung:

1. Bawang merah: 10 sampel, 6 belum ada foto tagging, pasokan dari Jatim dan NTB, harga Rp 15.000-Rp 30.000. Stok Bawang Lanang 4-5 ton dan bawang putih 3 ton.
2. Bawang putih: 5 sampel, semua memenuhi kriteria.
3. Cabe: 10 sampel cabe besar dan 6 cabe rawit, semua sesuai kriteria, pasokan dari petani lokal.
4. Daging sapi: 4 dari 10 sampel perlu diganti, stok di CV Sumber Gizi 150 kg.

Kabupaten Magelang:

1. Satu sampel bawang putih perlu diganti, 4 lainnya sesuai.
2. Dari 10 sampel cabe, 1 tidak memenuhi kriteria, 9 lainnya sesuai, pasokan dari petani lokal.

Kabupaten Semarang:

1. 13 sampel beras perlu diganti karena kesalahan skala.
2. 1 dari 10 sampel jagung perlu diganti karena kesulitan menghitung stok.
3. Sampel cabe sudah sesuai kriteria.

Usulan ke depan untuk menambahkan sampel beras penggilingan, daging ayam, dan telur. Tindak lanjut termasuk penggantian sampel yang tidak sesuai dan verifikasi data untuk meningkatkan kualitas SIMONSTOK.

2. Monitoring Sampel Kegiatan Survey Stok Pangan (Simonstok) di Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kota Pekalongan dan Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan monitoring stok pangan (Simonstok) berlangsung pada 1-3 Agustus 2024 di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Kendal, bertujuan untuk verifikasi dan evaluasi sampel serta pengambilan data stok. Hasil kegiatan meliputi:

1. Kota Surakarta:

5 sampel daging sapi di Pasar Gedhe dan Pasar Nusukan dengan stok 10-15 kg/hari. Semua sampel tidak memenuhi kriteria karena tidak merata. Perlu perbaikan dengan memilih sampel dari RPH atau distributor yang memiliki cold storage.

2 Kabupaten Boyolali:

6 komoditas, termasuk daging sapi dan cabai, sudah sesuai kriteria. Satu sampel telur ayam perlu diganti dengan distributor khusus. Rata-rata stok daging sapi 10-15 kg/hari, dan perlu perbaikan titik sampel.

3 Kota Pekalongan:

5 sampel daging sapi berasal dari 1 RPH, perlu diganti dengan distributor daging. Stok daging sapi dari distributor pada 2 Agustus 2024 mencapai 4 ton.

4 Kabupaten Kendal:

10 sampel telur ayam dan 10 jagung. Dua lokasi telur ayam perlu diganti, sedangkan sampel jagung sudah sesuai. Distributor telur ayam memiliki stok 270-400 kg/hari.

Rencana Tindak Lanjut

Perbaikan sampel yang tidak sesuai akan dilakukan secara bertahap dan akan diadakan evaluasi serta bimbingan teknis untuk enumerator.

- 3. Pemantauan Gudang Bulog Provinsi Jawa Tengah.** Pemantauan stok gudang Bulog di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Kegiatan monitoring stok pangan (Simonstok) dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Agustus 2024. Tujuan kegiatan adalah memantau stok yang ada di sub divre provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dalam kegiatan program bantuan pemerintah. Koordinasi dipimpin oleh Ketua Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan, dihadiri oleh Tim Kerja Pengawasan Ketersediaan Pangan dan staf gudang Bulog Harjosari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hasil Pemantauan sebagai berikut:

A. Gudang Bulog Harjosari Semarang:

1. Kapasitas 4.000 ton, dengan stok 1.023,35 ton (795,15 ton untuk Bantuan Pangan, 228,2 ton untuk Bulog). Sumber beras dari dalam negeri, Thailand, dan Vietnam.
2. Menyalurkan 875,25 ton beras untuk 87.525 penerima manfaat di Semarang dan Salatiga, dimulai awal Agustus 2024.

B. Gudang Bulog Demak:

1. Stok CPP sebesar 1.514 ton.
2. Beras impor: 500 ton dari Pakistan, 1.500 ton dari Vietnam.

3. Menyediakan 200 ton kebutuhan pangan pokok per bulan, cukup untuk 7 bulan ke depan.

C. Gudang Bulog Bondansari Pekalongan:

1. Stok CPP 5.804 ton dan beras SPHP 13.900 kg.
2. Konsumsi beras di Kota Pekalongan 655 ton dengan populasi 321.095 jiwa. Kolaborasi dengan Dinas Pangan untuk Gerakan Pangan Murah.

Rencana Tindak Lanjut:

Monitoring ketersediaan secara rutin akan dilakukan secara rutin pada gudang-gudang Bulog di Indonesia baik melalui sistem pergudangan maupun visit.

4. **Monev Pasokan dan Harga Pangan serta Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Pasar Kosambi dan Gudang Perum BULOG Jawa Barat.** Kegiatan monev dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024. Tujuan kegiatan adalah Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Pasar Kosambi Bandung, serta pemantauan ketersediaan beras di gudang BULOG. Kunjungan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jabar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, Satgas Pangan, Perum BULOG Kantor Cabang Kota Bandung, Pengelola Pasar, Tim Direktorat SPHP, Tim Direktorat PPSKMP, Tim Direktorat KP dan Tim Humas Bapanas.

Rencana Tindak Lanjut:

Badan Pangan Nasional memberikan masukan untuk Perum BULOG membuat sistem terkait penyaluran banpang dan penyaluran beras SPHP untuk kios pangan agar dapat terlihat oleh semua pihak mana wilayah yang defisit perlu dibantu untuk mengatasi inflasi di daerah tersebut.

5. **Pertemuan Evaluasi Sampel Simonstok Komoditas Beras dan Jagung.**

Pertemuan evaluasi dilaksanakan secara zoom meeting di RR Direktorat Ketersediaan Pangan pada tanggal 8 Agustus 2024. Tujuan pertemuan adalah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh sampel Simonstok sehubungan dengan ditemukannya sampel yang tidak sesuai kriteria setelah dilakukannya pemantauan sampel Simonstok di Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Rencana Tindak Lanjut:

- a. Penggantian sampel yang sesuai dengan penetapan skala dan berstatus aktif sesuai dengan kuota awal.
- b. Untuk sampel yang masih kurang atau lebih agar enumerator dapat berkoordinasi dengan koordinator provinsi untuk melakukan penambahan atau menghapus sampel yang tidak terpakai.
- c. Perbaikan sampel dapat dilakukan secara berkala dimulai pada periode pelaporan bulan Agustus.

6. Pertemuan Pemantauan Lapang ke Distributor Beras Khusus

Kegiatan pemantauan distribusi beras khusus dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait jumlah pembelian, jumlah distribusi, dan stok beras khusus saat ini yang ada di gudang distributor PT Sodara Tani Sentosa. Pemantauan dilaksanakan oleh perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional dengan owner dan staf dari PT. Mega Guna Shari yang diawali dengan pemantauan ke gudang penyimpanan beras khusus.

Rencana tindak lanjut:

- Merealisasikan sisa alokasi impor yang masih ada untuk tahun 2024
- Mempersiapkan rencana kebutuhan untuk tahun 2025

7. Rapat Koordinasi Penerima Bantuan Sarana Prasarana Logistik

Rapat pendataan stok pangan pada pelaku usaha penerima Sapras Sarana Logistik dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Tujuan rapat adalah memantau ketersediaan pada penerima bantuan sarana prasana yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka untuk mengetahui pemanfaatan dan stok pangan yang tersimpan pada alat/gudang pendingin. Pertemuan dibuka oleh ketua Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh penerima sarana dan prasarana 2022-2024 dari Badan Pangan Nasional.

Rencana Tindak Lanjut:

Pembuatan akun pelaku usaha pada sistem pergudangan Badan Pangan Nasional dan Pelaporan pelaku usaha pada sistem pada bulan Agustus 2024.

8. Rapat Pra Evaluasi Proyeksi Neraca Pangan secara hybrid

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Tujuan pertemuan dalam rangka persiapan pertemuan nasional evaluasi proyeksi neraca pangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Direktur Pengelola Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan di 38 Provinsi, serta Tim Direktorat KP.

Perkembangan saat ini:

- a. Fakultas Ekonomi, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara dan Bank Indonesia sedang bekerjasama melakukan penelitian terkait bagaimana membuat neraca pangan wilayah di Provinsi Maluku Utara, khusus nya terkait perdagangan antar wilayah. Hal ini disambut baik oleh banyak pihak sebagai salah satu solusi terkait permasalahan penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah yaitu sulitnya mendapatkan data barang masuk dan barang keluar pangan
- b. Launching aplikasi proyeksi neraca pangan V.3 akan dilakukan pada saat pertemuan evaluasi proyeksi neraca pangan pada tanggal 20 Agustus sehingga diharapkan untuk seluruh wilayah membawa datanya masing-masing.

Rencana Tindak Lanjut:

Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan data proyeksi neraca pangan masing-masing daerah dan masing-masing daerah menyampaikan kendala dalam penyusunan proyeksi neraca pangan pada saat pertemuan agar didiskusikan bersama.

9. Pemantauan Lapang ke Distributor Beras Khusus ke PT. Dewa Tunggal Abadi

Kegiatan pemantauan distribusi beras khusus dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Tujuan pemantauan adalah untuk memperoleh informasi terkait jumlah pembelian, jumlah distribusi, dan stok beras khusus saat ini yang ada di gudang distributor PT Dewa Tunggal Abadi (PT.DTA). Adapun pembahasan bahwa PT. DTA mengimpor beras khusus melalui alokasi dari PT Sarinah dan distributor lokal, dengan distribusi ke horeka, retail, dan end user. Pada tahun 2023, pembelian dari PT Sarinah mencapai 3.100 ton, dan pada 2024 sebanyak 3.700 ton, dengan tambahan permintaan 3.000 ton beras ketan dan 1.000 ton beras Jasmine. Harga beli beras bervariasi, dengan Hom Mali 18.500/kg dan Basmati 21.000/kg.

Beras didistribusikan ke wilayah Jabodetabek, Kalimantan, Bali, dan Sumatera, disimpan di gudang dengan kapasitas 750 ton, termasuk ruang berpendingin untuk menjaga kualitas. Namun, PT DTA menghadapi kendala keterbatasan kuota impor dan keterlambatan pengiriman hingga 5 hari.

Rencana Tindak Lanjut :

PT DTA akan melengkapi beberapa data terkait realisasi dan distribusi beras khusus lokal.

10. Pemantauan Lapangan ke Distributor Beras Khusus ke PT. Masuya Graha Trikencana

Kegiatan pemantauan ke distribusi beras khusus dilaksanakan pada 15 Agustus 2024. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait proses bisnis beras khusus terkait jumlah pembelian, jumlah distribusi, stok, dan harga pembelian serta penjualan, mengetahui kendala yang dialami dalam proses impor dan distribusi serta mendapatkan masukan terkait jumlah kebutuhan beras khusus dalam rangka menentukan kebijakan impor beras khusus dengan ringkasan pertemuan menyatakan bahwa PT.

Masuya Graha Trikencana adalah distributor beras khusus yang telah bekerja sama dengan PT. Sarinah selama 15 tahun, membeli beras Japonica dari Jepang dan Vietnam. Gudangnya di Kabupaten Bekasi memiliki kapasitas 150 ton dan menyimpan beras dalam ruangan berpendingin dengan suhu 15 hingga 20 derajat Celsius, maksimal selama 3 bulan. Pendistribusian beras khusus dilakukan ke hotel dan restoran di Jabodetabek dalam kemasan 5 kg dan 10 kg, dengan alokasi tahun 2024 sekitar 1.200 ton, yang sudah direalisasikan 90%, dan saat ini memiliki stok 80 ton. PT.Masuya memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan sebesar 40-50% tahun depan, namun menghadapi kendala dalam pembelian beras, termasuk harga fluktuatif dan birokrasi impor yang rumit. Rencana tindak lanjut mencakup merealisasikan alokasi impor yang tersisa untuk 2024 dan menggunakan hasil pemantauan untuk kebijakan alokasi selanjutnya.

11. Pemantauan Lapangan ke Distributor Beras Khusus ke PT. Manggala Prabu Pratama, Jakarta Barat

Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024. Pemantauan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses bisnis impor beras khusus seperti jumlah pembelian, jumlah distribusi, stok, harga pembelian dan penjualan, mengetahui kendala yang dialami dalam proses impor dan distribusi, serta mendapatkan masukan terkait jumlah kebutuhan beras khusus dalam rangka menentukan kebijakan impor beras khusus.

Point pertemuan menyatakan bahwa PT Manggala Prabu Pratama, yang mulai melakukan pembelian beras khusus impor sejak 2023 melalui alokasi dari PT Sarinah, mengimpor beras Hom Mali, Basmati, Japonica, dan Jasmine. Pada 2023, pembelian beras mencapai 1.621 ton, dan untuk 2024 direncanakan 1.800 ton. Beras Basmati berasal dari India, sementara Japonica dan Jasmine dari Vietnam, dan didistribusikan ke restoran serta retail di Jabodetabek dan Lampung. Dengan kapasitas gudang 250-300 ton, stok saat ini hanya beras Jasmine sekitar 1.500 kg, dan perputaran stok berlangsung cepat. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan kuota dan lama pengiriman beras Basmati. Meskipun ada proyeksi pasar yang positif, tantangan harga membuat pencarian pasar untuk beras Hom Mali sulit. Untuk 2025, perusahaan mengajukan kebutuhan yang sama dengan 2024 dan juga membeli beras umum dalam negeri. Hasil pemantauan ini akan digunakan untuk rekomendasi kebijakan terkait ketersediaan beras khusus di masyarakat.

12. Rapat Koordinasi Ketersediaan Stok Kedelai

Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Direktur Ketersediaan Pangan, dan dihadiri oleh Direktur Utama PT. FKS Multi Agro, Ketua GAKOPTINDO, Ketua Asosiasi Importir Kedelai Indonesia, Koordinator Pokja Pengendalian Ketersediaan Pangan, dan anggota Tim Pokja Pengendalian Ketersediaan Pangan. Tujuan rapat ini dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan stok kedelai di Gakoptindo dan importir. Adapun poin inti rapat menyatakan bahwa Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu (GAKOPTINDO) melaporkan bahwa stok kedelai di pengrajin saat ini aman dan tercukupi dari importir, dengan 244.000 anggota yang terdiri dari 40% pengrajin tahu dan 60% pengrajin tempe, meskipun pengrajin skala besar hanya kurang dari 1%.

Harga kedelai merk Bola, yang menjadi barometer, saat ini Rp 9.000/kg. PT FKS Multi Agro menjelaskan bahwa kedelai tidak dapat menghasilkan produksi maksimal di iklim tropis, sehingga sebagian besar kedelai diimpor untuk makanan. Asosiasi Kedelai Indonesia (AKINDO) mencatat bahwa stok kedelai di importir biasanya mencukupi untuk 2 bulan, dengan stok Agustus sebanyak 385.000 ton. Jika stok kurang dari 2 bulan, distribusi kedelai dari Amerika memerlukan waktu sekitar 7 hari. Rencana tindak lanjut mencakup koordinasi dengan Kemendag untuk mendapatkan data stok dari importir, yang saat ini tidak tersedia secara terbuka.

13. Pemantauan Lapang Distributor Beras Khusus ke PT. Hantika Tiga Bersaudara (HTB)

Kegiatan pemantauan distribusi beras khusus dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Pemantauan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi serta gambaran yang lengkap terkait tata laksana distribusi beras khusus yang akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan ketersediaan beras khusus di masyarakat

Adapun poin rapat menyatakan bahwa PT Hantika Tiga Bersaudara (PT HTB) adalah perusahaan yang mengimpor beras khusus jenis Japonica dan Jasmine dengan alokasi dari PT PPI. Distribusi dilakukan melalui gudang sewa berkapasitas 10.000 ton di Kapuk Kamal, Jakarta, dan didistribusikan ke dua distributor (Pak Siswanto dan PT. Niaga Mulia) sebelum disalurkan ke sektor Horeka.

Pada tahun 2023, distribusi mencapai 250 ton, dan pada 2024 sebesar 125 ton. PT HTB menghadapi kendala kuota impor yang terbatas meskipun permintaan pasar tinggi. Untuk tahun 2025, perusahaan merencanakan impor 500-600 ton beras Japonica dan 1.000 ton beras Jasmine.

14. Pertemuan Nasional Evaluasi Proyeksi Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2024

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Hotel Grand Savero, Bogor. Pertemuan dibuka oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas Perwakilan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kemendagri, Kepala Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Perwakilan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi DI. Yogyakarta, dan Penanggung Jawab Kegiatan Proyeksi Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan Provinsi. Pertemuan dihadiri secara offline oleh 76 peserta perwakilan dari 38 Provinsi dan melalui online untuk petugas dari Kabupaten/Kota.

15. FGD Kajian/Survei Kebutuhan Beras Khusus Tahun 2024

Proyeksi Neraca Pangan memerlukan koordinasi lintas lembaga dan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Badan Pangan Nasional. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor pangan menjadi prioritas untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional dengan program swasembada pangan. Kemendagri menekankan pentingnya penyusunan Neraca Pangan Wilayah untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi, dengan surat pemberitahuan akan dikirimkan ke daerah terkait pentingnya penyusunan ini, termasuk dukungan anggaran APBD.

Sharing session dari Jawa Barat dan Yogyakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dan metode lokal untuk mengatasi tantangan pangan. Evaluasi dana dekonsentrasi menunjukkan realisasi rendah, dengan target 70% pada Agustus 2024, namun hanya tercapai 35%. Lima provinsi belum merealisasikan dana. Rencana tindak lanjut mencakup peningkatan realisasi dana dekon, kajian perdagangan wilayah, dan pembahasan proyeksi pangan dalam rapat inflasi mingguan.

16. Pemantauan Lapang ke Distributor Beras Khusus ke PT. Marcoria Putra

Kegiatan pemantauan distributor beras khusus dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024. Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi serta gambaran yang lengkap terkait tata laksana distribusi beras khusus yang akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan ketersediaan beras khusus di masyarakat.

PT Marcoria Putra adalah distributor beras khusus yang menggunakan alokasi impor dari PT Sarinah, dengan fokus pada beras Basmati yang diimpor dari India. Mereka memiliki gudang berkapasitas 150 ton di Jakarta Timur. Distribusi beras dilakukan ke restoran di Jakarta, Bekasi, dan Bali dalam kemasan 1 kg dan 5 kg. Untuk tahun 2024, alokasi sebesar 260 ton telah direalisasikan sepenuhnya, dengan stok merk Abu Nawas sebanyak 80,3 ton dan Abu Khas 10,2 ton. Perusahaan memerlukan tambahan alokasi sebesar 200 ton tahun ini, dan kebutuhan untuk tahun depan diperkirakan 500 ton. PT Marcoria Putra tidak menghadapi kendala distribusi, namun kuota impor masih belum mencukupi permintaan. Rencana tindak lanjut melibatkan penjualan stok yang ada dan pemantauan untuk masukan terkait kebijakan alokasi impor berikutnya.

17. Pemantauan Lapang ke Distributor Beras Khusus ke PT. Hadjar Aswat Tani Indonesia

Kegiatan pemantauan ke distributor beras khusus dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait proses bisnis beras khusus terkait jumlah pembelian, jumlah distribusi, stok, dan harga pembelian serta penjualan, mengetahui kendala yang dialami dalam proses impor dan distribusi serta mendapatkan masukan terkait jumlah kebutuhan beras khusus dalam rangka menentukan kebijakan impor beras khusus.

PT HATI, distributor beras yang berdiri sejak 2019, awalnya hanya mendistribusikan beras lokal, namun kini fokus pada beras khusus seperti jasmine dan basmati. Pada 2024, PT HATI membeli 528 ton beras basmati dan 500 ton beras jasmine dari PT PPI, dengan rencana tambahan 250 ton beras jasmine. Beras basmati diimpor dari India dan beras jasmine dari Vietnam, dikemas dalam 25 kg dan 5 kg untuk basmati, serta 25 kg untuk jasmine. Distribusi beras khusus mencakup Jabodetabek melalui Horeka (Restoran Arab) dan D2, dengan rencana memperluas ke e-commerce. Harga jual beras basmati Rp 24.500-25.000/kg dan beras jasmine Rp 15.000/kg. PT HATI memiliki dua gudang dengan total kapasitas 575 ton.

Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan kuota impor dan masalah teknis seperti infestasi kutu akibat penyimpanan yang buruk di gudang Bulog. Rencana impor PT HATI ditargetkan 30% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dengan proyeksi impor 1.000 ton untuk beras jasmine dan 1.000 ton untuk basmati pada tahun depan.

18. Pemantauan Lapang ke Distributor Beras Khusus ke PT. Indomaru Lestari, Jakarta Barat

Kegiatan pemantauan ke distributor beras khusus dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024. Pemantauan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses bisnis impor beras khusus seperti jumlah pembelian, jumlah distribusi, stok, harga pembelian dan penjualan, mengetahui kendala yang dialami dalam proses impor dan distribusi, serta mendapatkan masukan terkait jumlah kebutuhan beras khusus dalam rangka menentukan kebijakan impor beras khusus. PT Indomaru Lestari, berdiri sejak 1995 dan awalnya bergerak di bidang saus Jepang, mulai mengimpor beras khusus pada 2011 dengan alokasi dari PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Mereka memiliki gudang berkapasitas 500 ton dengan fasilitas pendingin. Pada 2023, perusahaan membeli 60 ton beras Japonica, dan pada 2024 membeli 150 ton dari PT Sarinah serta 25 ton dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

19. Rapat Pembahasan lanjutan Draft PKS antara Badan Pangan Nasional dengan PT. ASDP

Pertemuan pada 22 Agustus 2024 di ruang rapat Nusantara I Badan Pangan Nasional bertujuan untuk memfinalkan draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dan PT ASDP Indonesia Ferry. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan, dihadiri oleh berbagai tim dari PT ASDP dan Bapanas.

Beberapa poin penting yang dibahas meliputi usulan perubahan judul PKS agar lebih spesifik, mekanisme sosialisasi pelaku usaha angkutan bahan pangan terkait anggaran, reposisi pasal tentang pelaksanaan, perubahan jangka waktu PKS menjadi 2 tahun, serta teknis pertukaran data bahan pangan. PT ASDP juga berencana meluncurkan aplikasi "go live" yang diharapkan melibatkan Bapanas untuk menjelaskan mekanisme distribusi. Tim IT ASDP telah menyiapkan fitur tambahan dalam aplikasi Ferizy untuk memenuhi kebutuhan data Bapanas. Timeline penyusunan PKS meliputi review draft pada awal September 2024, finalisasi pertengahan September, dan penandatanganan akhir September 2024. Rencana tindak lanjut melibatkan koordinasi antara tim IT kedua pihak untuk integrasi sistem.

20. Updating Proyeksi Neraca Pangan 2024

Pertemuan Updating Proyeksi Neraca Pangan tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 di Hotel Aston Simatupang, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, melibatkan perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga untuk menyusun Proyeksi Neraca Pangan nasional.

Dalam pertemuan ini, disampaikan bahwa data KSA untuk beras dan jagung hingga Oktober 2024 masih sementara, sementara impor beras Perum BULOG mencapai 2.513.046 ton dan diperkirakan ada tambahan 27.000 ton hingga akhir Agustus. Lonjakan ekspor jagung sebesar 40.861 ton terjadi pada Juli akibat panen raya, dan data stok pakan dapat diakses melalui aplikasi Simpakan. Penambahan data ekspor minyak goreng dan beras dijadwalkan untuk update bulan September 2024, dengan peringatan bahwa stok bawang putih hanya cukup untuk kurang dari 8 hari. Rencana tindak lanjut mencakup pengiriman surat kepada Kemendag untuk permintaan data ekspor dan penyampaian hasil updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Agustus 2024 kepada kementerian dan lembaga terkait.

21. Pertemuan Koordinasi Pemantauan Ketersediaan Stok Beras di Pelaku Usaha Beras

Pada 23 Agustus 2024, di Ruang Rapat Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional, diadakan pertemuan untuk mengevaluasi ketersediaan stok beras di pelaku usaha dan mekanisme pelaporan secara berkala, yang dipimpin oleh Ketua Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan.

Pertemuan dihadiri oleh PT Wilmar, PT Buyung Putera Sembada, Asosiasi Pengusaha Beras Jawa Barat, dan Food Station Cipinang Jaya. PT Buyung Putera Sembada melaporkan stok beras sebesar 12.200 ton dan 177 ton gabah, dengan informasi stok akan dilaporkan setiap bulan. Food Station mencatat stok 45.570 ton dengan pasokan normal, sementara PT Wilmar masih dalam proses koordinasi untuk memberikan data.

Koperasi Asosiasi Gapoktan Beras Jawa Barat, yang terdiri dari 320 gapoktan, memiliki stok rata-rata 4500-5000 ton dan harga beras medium berkisar antara Rp 11.200-11.800 per kilogram. Rencana tindak lanjut menetapkan pelaku usaha untuk melaporkan stok beras secara bulanan kepada Direktorat Ketersediaan Pangan.

22. Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Dokumen Lampiran pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Pangan Nasional dengan PT. ASDP Indonesia Ferry

Pada 30 Agustus 2024, di Balitro, Bogor, diadakan pertemuan untuk menyusun petunjuk teknis Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan PT ASDP Indonesia Ferry, yang dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh anggota tim.

Pertemuan menghasilkan petunjuk teknis yang mencakup data dan informasi penting untuk memenuhi kebutuhan perdagangan komoditas pangan antar wilayah melalui transportasi angkutan penyeberangan, termasuk nama pelabuhan, jenis muatan, jenis komoditas, volume muatan, serta kota asal dan kota tujuan. Data yang dicakup dalam petunjuk teknis mencakup berbagai jenis komoditas pangan seperti beras, jagung, daging, dan sayuran, serta tonase muatan yang harus dilaporkan. Rencana tindak lanjut mencakup konsultasi dengan bagian hukum biro Organisasi, Sumberdaya dan Hukum (OSH) Badan Pangan Nasional untuk finalisasi perjanjian dan koordinasi dengan pihak ASDP mengenai data yang diperlukan.

23. Pertemuan Penyusunan Laporan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Agustus 2024

Pada tanggal 26 Agustus 2024, di Ruang Rapat Balitro, Kota Bogor, diadakan pertemuan untuk menyusun laporan updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Agustus 2024, yang dipimpin oleh Koordinator Neraca Pangan dan dihadiri oleh tim neraca pangan. Pertemuan membahas penyelesaian laporan yang mencakup risalah rapat, materi bahan tayang, serta surat hasil update yang akan disampaikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan BPS.

Selain itu, tim juga menyusun surat permintaan data ekspor untuk komoditas beras, jagung, dan minyak goreng kepada Kementerian Perdagangan, serta melakukan penginputan hasil update ke dalam aplikasi Proyeksi Neraca Pangan. Rencana tindak lanjut mencakup penyampaian surat hasil update Proyeksi Neraca Pangan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebelum ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

24. Rapat Permohonan Saran/Masukan Substansi RPP Perubahan Kedua atas PP No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Satu Negara asal Pemasukan

Pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Ruang Rapat Nusantara II Lt. 4 Badan Pangan Nasional dan secara daring melalui Zoom membahas RPP Perubahan Kedua atas PP No. 4 Tahun 2016 mengenai pemasukan ternak dan/atau produk hewan. Dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, rapat ini dihadiri oleh berbagai perwakilan direktorat terkait, termasuk Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta Biro Organisasi SDM dan Hukum (OSH) Badan Pangan Nasional. Poin-poin hasil rapat mencakup revisi pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional tidak dapat menugaskan BUMN Pangan selain Bulog, serta usulan penambahan ayat mengenai penetapan pelaku usaha. Rapat juga memutuskan agar Biro OSH bekerja sama dengan direktorat terkait dalam menyiapkan RPerbadan yang mencakup persyaratan tertentu dan komitmen BUMN Pangan dalam mendukung ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Rencana tindak lanjut mencakup penyampaian surat saran dan masukan hasil rapat kepada Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Kemenko Bidang Perekonomian.

25. Rapat Koordinasi Ketersediaan Kedelai

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 secara daring melalui Zoom bertujuan untuk menindaklanjuti diskusi mengenai data ketersediaan stok kedelai di kalangan pelaku usaha. Dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan, rapat ini dihadiri oleh perusahaan yang tergabung dan tidak tergabung dalam AKINDO (Asosiasi Kedelai Indonesia), serta tim Pokja. Hasil pertemuan menunjukkan bahwa perkiraan stok kedelai nasional pada bulan Agustus mencapai 385.000 ton, yang dipastikan dapat memenuhi kebutuhan pengrajin tempe dan tahu.

Para pelaku usaha importir kedelai telah melaporkan data realisasi dan stok kedelai secara bulanan kepada Kementerian Perdagangan, mendorong kerjasama antar kementerian/lembaga untuk akses data yang terintegrasi. Meskipun ketersediaan kedelai tergolong baik, ada kekhawatiran terkait kualitas kedelai yang diimpor, serta harga kedelai yang saat ini berada di bawah Rp 9.000/kg. Ambang batas untuk ketersediaan kedelai ditetapkan pada 250.000 ton, dengan stok di gudang importir berkisar antara 300.000-500.000 ton, menunjukkan kondisi yang aman. Rencana tindak lanjut mencakup koordinasi berkala dengan pelaku usaha terkait stok komoditas kedelai.

1.2. Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Regulasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

a) Harmonisasi RPermentan Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Agustus dipimpin oleh Pembina Tim Harmonisasi Kemkumham, serta dihadiri oleh Plt. Direktur Bitpro Kementan, perwakilan KPPU, perwakilan Setkab, Biro Hukum Kementan, serta Tim SPHP Bapanas. Rapat ini merupakan rapat lanjutan pada tanggal 5 Agustus 2024 yang masih secara umum meminta pandangan dari berbagai KL. Tujuan dari rapat ini yaitu membahas pasal per pasal RPermentan Perubahan Permentan No. 32 th 2017 sesuai dengan rekomendasi tindakan korektif dari OMBUDSMAN RI dan KPPU.

Adapun pasal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional adalah pasal 8 dimana disepakati bahwa Kementan memiliki tugas untuk menerbitkan data prognosa produksi dan kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi sementara bapanas bertugas menjaga stabilisasi pasokan dan harga melalui penugasan ke Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk melakukan pembelian sesuai HAP. RPermentan tersebut belum final karena masih banyak pasal yang belum dibahas secara rinci baik dari sisi teknis maupun drafting.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, tim kecil Kementan dan Kemenkumham akan membahas secara internal terkait beberapa hal teknis dan drafting sebelum dilakukan harmonisasi lanjutan.

b) Rapat Pembahasan Lanjutan Terkait Usulan Harga Pembelian Jagung Perum BULOG 2024

Rapat Pembahasan Lanjutan Usulan Harga Pembelian Jagung (HPJ) Pemerintah Perum BULOG 2024 dilaksanakan pada Senin 19 Agustus 2024.

Pertemuan dipimpin oleh Inspektur Bapanas, dihadiri Direktur SPHP, Kadiv Keuangan Perum BULOG, dan Tim SCPP Perum BULOG serta perwakilan Dit DCP Bapanas. Pertemuan bertujuan untuk finalisasi nilai HPJ 2024 sebelum ditetapkan melalui Kepbadan.

APIP Bapanas telah melakukan reviu terhadap usulan HPJ 2024 dari Perum BULOG, namun demikian masih perlu ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dan dilengkapi oleh Perum BULOG antara lain terkait dengan Persediaan Awal Jagung dan realisasi SPHP Jagung. Dari hasil penelaahan, terdapat beberapa penyesuaian terhadap biaya-biaya dalam penyelenggaraan CJP tahun 2024. Usulan awal HPJ Bulog sesuai surat tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp6.270/kg, setelah direviu sementara HPJ menjadi Rp5.651/kg. Perum BULOG agar melengkapi data dukung dan dokumen yang diperlukan sebelum ditelaah kembali oleh APIP Bapanas.

c) Harmonisasi Rperpres No.125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Harmonisasi RPerpres Perubahan Perpres 125/2022 dilaksanakan pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pokja Harmonisasi Kemenkumham, dihadiri Deputi KSP Bapanas, Asdep Pangan Kemenko Perekonomian, Direktur DCP, Kepala Biro OSH Bapanas, Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, perwakilan Setkab, Setneg, Kemendag, Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ID FOOD, unit kerja lingkup NFA dan perwakilan Dit. SPHP.

Penyaluran bantuan pangan sementara disepakati minimal 6 bulan dalam rangka memberikan outlet penyaluran CPP bagi BULOG dan menjaga agar konsep dynamic stock berjalan baik sesuai minimal stok yang dikelola BULOG. Terkait bentuk perubahan akan dikomunikasikan kembali dengan Setneg dan Kemenkumham. Pada prinsipnya revisi dapat dilakukan baik dalam bentuk perubahan ataupun penggantian.

Dalam pertemuan harmonisasi pleno sebelumnya terdapat sejumlah pending isu yang menjadi diskusi lintas K/L.

Pending issue antara lain terkait:

- jagung untuk pakan;
- penentuan batas paling singkat penyaluran bantuan pangan yang diusulkan minimal 6 bulan; dan
- bentuk perubahan Perpres diubah atau diganti (karena lebih dari 50%);

Bapanas telah menindaklanjuti hal tsb dengan mengadakan rapat koordinasi bersama K/L terkait utk membahas pending issue. Target revisi Perpres 125/2022 dapat diundangkan maksimal Oktober 2024.

d) Highlight Rapat Koordinasi Inflasi Agustus 2024

Rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri pada 30 Agustus 2024, dihadiri secara offline oleh Deputi III Bapanas, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, serta Dirjen Kemendag, dan secara online oleh Deputi III Kantor Staf Presiden dan berbagai instansi terkait. Pembahasan utama berfokus pada perkembangan inflasi, di mana kelompok transportasi mengalami inflasi tertinggi dengan andil terbesar terhadap inflasi nasional, terutama akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hingga minggu ke-4 Agustus 2024, lebih banyak Kabupaten/Kota mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan dengan kenaikan, meski terdapat beberapa daerah dengan kenaikan tertinggi yang didominasi oleh komoditas seperti beras dan cabai.

Selain itu, Deputi Kemendag menyoroti belum adanya penurunan harga minyak goreng sejak diterbitkannya Permendag 18/2024, dan menjelaskan bahwa distribusi minyak goreng kemasan diharapkan lebih higienis. Komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang merah, jagung, dan daging ayam, dengan upaya stabilisasi pasokan melalui penandatanganan PKS penyerapan bawang merah. Stok beras BULOG per 23 Agustus 2024 tercatat 1.347.276 ton, dengan penyaluran bantuan pangan yang sudah mencapai 93,97%. Rapat juga mengingatkan perlunya percepatan realisasi anggaran dekonsentrasi Bapanas untuk pengendalian inflasi pangan yang telah mencapai 53,81% dari target.

e) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE Badan Pangan Nasional

Rapat yang diadakan secara offline pada 12 Agustus 2024 di Hotel Santika Depok, dipimpin oleh Kapusdatin dan dihadiri oleh Ibu Andrari Grahitandaru dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN sebagai narasumber, bertujuan untuk melakukan Audit TIK SPBE terhadap aplikasi panel harga pangan.

Audit ini fokus pada penilaian keterpaduan dan integrasi data aplikasi sebelum ditetapkan apakah sudah memenuhi syarat untuk masuk ke Satu Data Indonesia (SDI) dan menggunakan Sistem Penghubung Layanan (SPL). Tim Koordinasi SPBE mengacu pada pasal 60 Perpres SPBE, yang mengatur tugas pimpinan instansi pusat dalam kebijakan dan koordinasi SPBE, serta mengidentifikasi nilai kapabilitas dan tingkat kematangan organisasi dalam melaksanakan aspek-aspek SPBE, termasuk tata kelola, manajemen, fungsional aplikasi, dan kinerja. Tindak lanjut dari rapat ini melibatkan pengisian jawaban untuk pertanyaan audit internal dan penyediaan bukti dukung oleh Tim Pusdatin dan Tim SPHP secara paralel.

f) Forecast Harga Pangan

Rapat yang dipimpin oleh Direktur SPHP Bapanas pada 12 Agustus 2024 dihadiri oleh para ahli dari BRIN dan Telkom University untuk membahas forecast harga pangan pokok menggunakan metode Machine Learning, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama antara Dit. SPHP, BRI, dan Tel-U. Empat komoditas yang dibahas mencakup beras, jagung, telur, dan bawang merah, dengan hasil update akurasi validasi untuk beras premium dan medium mencapai 96,72% hingga 98,14%, sementara forecast harga jagung menggunakan model LSTM-SVR menunjukkan akurasi 31 hingga 37%.

Untuk telur, metode SARIMA digunakan untuk menghasilkan data visual dan time series forecasting, sedangkan prediksi harga bawang merah masih dalam tahap awal, memerlukan penambahan variabel luas lahan.

Tindak lanjut mencakup dukungan data untuk memperkaya variabel input, pembuatan grafik harga real dan prediksi, serta analisis dampak dari harga yang diprediksi untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Rapat juga merencanakan pertemuan lanjutan secara offline di Bandung dan webinar hybrid antara Bapanas, BRIN, dan Tel-U, melibatkan Bank Indonesia dan asosiasi pasar, serta kolaborasi publikasi antara ketiga institusi.

g) Paparan Direktorat SPHP ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Rapat yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2024 di Ruang Rapat Nusantara II, Gedung E, Badan Pangan Nasional, dihadiri oleh Tim BPK RI dan Tim SPHP untuk membahas berbagai aspek kegiatan SPHP. Dalam paparan tersebut, dibahas mengenai regulasi dan kebijakan SPHP, jenis kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Tim BPK RI mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain terkait indikasi penyaluran beras SPHP yang didasarkan pada pantauan harga nasional, serta validasi data harga pangan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui pembatasan harga pada aplikasi Panel Harga Pangan untuk mengurangi kesalahan input. Diketahui bahwa saat ini SPHP baru dilaksanakan untuk beras dan jagung, sementara komoditas lain seperti hortikultura masih belum memadai penyimpanannya. Diskusi juga menyentuh dampak fluktuasi harga beras yang berpengaruh pada harga komoditas lain, serta stabilitas harga pada komoditas tertentu seperti gula dan daging sapi. Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang sudah dilaksanakan secara masif di 37 Provinsi juga dibahas sebagai instrumen stabilisasi harga pangan. Diungkapkan pula pentingnya efisiensi rantai pasok yang belum diatur, serta kebutuhan akan stok pangan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mencegah gejolak harga dan pasokan. Rencana pembangunan sistem informasi ketersediaan pasokan dan harga pangan yang terkoneksi dengan 38 Provinsi juga disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan pangan.

h) Rapat Koordinasi SPHP Jagung

Rapat daring yang dilaksanakan di ruang rapat Deputy I KSP NFA melibatkan berbagai perwakilan dari instansi terkait, termasuk Direktur SPHP, Ombudsman RI, dan Kementerian Pertanian. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya mengenai SPHP Jagung dan laporan pemanfaatan CJP hingga Juni 2024.

Berdasarkan perhitungan, terdapat surplus jagung nasional sebesar 0,36 juta ton untuk periode Januari hingga September 2024, meskipun produksi mengalami penurunan dibanding tahun lalu sekitar 260 ribu ton. Data harga menunjukkan bahwa harga jagung pipilan kering tingkat produsen berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), sedangkan harga jagung di tingkat peternak lebih tinggi, mencapai Rp6.277/kg. Laporan dari koperasi dan asosiasi peternak mengungkapkan fluktuasi harga jagung di berbagai daerah dan menyarankan Perum BULOG untuk memperluas penyerapan jagung guna menjaga buffer stok. Selain itu, usulan juga disampaikan agar penyaluran CJP lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi harga. Tindak lanjut dari rapat ini mencakup perlunya koordinasi lebih lanjut antara K/L untuk keputusan terkait penyaluran CJP dan pembaruan data peternak.

i) Rapat Tindak Lanjut Penyerapan Bawang Merah Tingkat Petani

Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai upaya stabilisasi harga bawang yang jatuh, dimana petani mengalami kerugian dengan harga bawang yang jatuh. Dengan konsep off taker (BUMN dan BUMD Pangan) membantu serap bawang petani supaya mendapat keuntungan. secara psikologis menjaga agar harga tidak semakin jatuh lagi. Bawang merah mengalami panen raya bahkan surplus pada bulan Agustus sampai September dengan kuantiti surplus mencapai 150.000 ton. Diharapkan dapat terserap minimal 10% untuk menjaga stabilitas harga. Kesepakatan Harga Beli Bawang Merah oleh Off Taker senilai Rp 16.000/kg, Harga Buy Back oleh ABMI senilai Rp 20.283/kg, dengan ketentuan Margin yang diterima oleh Off Taker sebesar 4% dan lama simpan 3 bulan, dengan rincian sebagai berikut.

Dalam pertemuan ini, Off Taker akan melakukan koordinasi dan Feasibility Study terkait margin 4% yang ditawarkan, dengan fokus pada dua jenis kualitas bawang merah: kualitas pertama 80:20 (konde askip:rogol) dan kualitas kedua seluruhnya rogol. ABMI menyarankan untuk menggunakan rasio 80:20 guna mempersiapkan intervensi pasar jika diperlukan. ID Food mengonfirmasi bahwa spesifikasi bawang dalam surat penawaran dari ABMI telah ditetapkan pada proporsi tersebut. Petani yang terlibat dalam pengadaan bawang harus berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, dengan rekomendasi kualitas yang diberikan oleh ABMI, bukan Dinas. Selain itu, penting untuk memastikan pemilik gudang memiliki akses penuh, termasuk penguasaan kunci, akses keluar masuk barang, dan akses CCTV.

Tindak lanjut dari rapat ini mencakup ABMI yang akan memberikan rincian Cost Structure untuk pembelian bawang merah dengan harga Rp16.000/kg, penggunaan dua perusahaan untuk transaksi Buy Back (satu sebagai penjual dan satu sebagai pembeli), serta penyusunan kesepakatan mengenai kualitas bawang yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar Quality Control.

j) Rapat Koordinasi Update Prediksi Harga Pangan bersama BRIN dan Telkom University (TeLU)

Rapat yang dipimpin oleh Koordinator Kelompok Substansi Kebijakan Harga Konsumen dihadiri oleh sejumlah anggota dari BRIN, Telkom University, dan Tim SPHP. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan update forecast harga sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya, berfokus pada finalisasi perhitungan harga pangan pokok menggunakan Machine Learning, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat SPHP, BRIN, dan Telkom University.

Forecast harga ditargetkan untuk empat komoditas: beras, jagung, telur ayam ras, dan bawang merah, yang diharapkan selesai hingga akhir tahun dengan laporan perkembangan dari Prof. Agung kepada Direktur SPHP. Update untuk setiap komoditas mencakup: untuk beras, model menunjukkan akurasi lebih dari 95% dengan hasil terbaik untuk beras premium; jagung menggunakan struktur model LSTM-SVR dengan akurasi terbaik 48-60%; telur ayam ras masih menghadapi tantangan dalam akurasi karena kekurangan variabel data; dan bawang merah mengalami fluktuasi harga, dengan kekurangan data yang perlu diatasi.

Tindak lanjut dari pertemuan mencakup koordinasi dengan tim kecil Bapanas untuk menyamakan pemahaman terkait data yang diperlukan, pengiriman variabel data yang dibutuhkan oleh Tim Bapanas, dan rencana untuk mengadakan Webinar publik pada bulan September sebagai pelaporan kepada Badan Pangan Nasional.

2. Panel Harga Pangan

a) Bimbingan Teknis (Bimtek) Panel Harga Pangan

Bimtek Panel Harga Pangan diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara Petugas Enumerator dan Pengolah Data terkait pelaksanaan Panel Harga Pangan sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan petugas dalam pengolahan data sederhana, mencakup materi seperti Review Juknis SPHP melalui Panel Harga Pangan, serta teknik Pengolahan Data Harga, termasuk pembuatan tabel dinamis, infografis, dan peta perkembangan harga. Pelaksanaan bimbingan teknis ini juga merupakan wujud dari penggunaan anggaran dana dekonsentrasi Badan Pangan Nasional yang dialokasikan untuk 38 provinsi. Hingga Agustus 2024, 31 provinsi telah melaksanakan bimbingan teknis, sementara tujuh provinsi lainnya belum, dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi terakhir yang melaksanakan kegiatan ini pada 28 Agustus 2024.

b) Perkembangan Harga Pangan Periode Agustus 2024

Harga rata-rata nasional komoditas tingkat produsen pada Agustus 2024 untuk komoditas yang aman yaitu Cabai Merah keriting dan Cabai Rawit Merah. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Kedelai Biji Kering, Sapi, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras.

Komoditas yang berada pada status intervensi yaitu GKG Tingkat Penggilingan ($2,41\% < \text{HPP}$), Jagung Pipilan Kering ($15,41\% < \text{HAP}$), dan Bawang Merah ($41,25\% < \text{HAP}$). Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat produsen yang berada di bawah HAP/HPP dan di atas HAP/HPP, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di bawah HAP/HPP yang mengalami peningkatan terjadi pada komoditas Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Telur Ayam Ras, dan Ayam Ras. Adapun wilayah dengan harga rata-rata berada di bawah HAP/HPP yang mengalami penurunan terjadi pada komoditas Gabah Kering Panen, Jagung, dan Cabai Rawit Merah. Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Agustus 2024 untuk komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium ($1,33\% > \text{HET}$) dan Beras Medium ($4,13\% > \text{HET}$). Sedangkan komoditas lainnya masuk dalam kategori aman, yaitu Kedelai ($0,51\% > \text{HAP}$), Jagung ($4,91\% > \text{HAP}$), Bawang Merah ($34,39\% > \text{HAP}$), Daging Sapi ($2,85\% > \text{HAP}$), dan Minyak Goreng Curah ($2,83\% > \text{HAP}$).

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan terjadi pada komoditas Cabai Rawit Merah, Minyak Goreng Curah dan Bawang Merah. wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HET/HAP yang menunjukkan mengalami penurunan terjadi pada komoditas Beras Premium, Kedelai, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Jagung Pipilan Kering.

c) Perkembangan Aplikasi Panel Harga Pangan

Perkembangan aplikasi Panel Harga Pangan kini berada dalam tahap percobaan, di mana uji coba dilakukan oleh tim Direktorat SPHP, tim pengembang (PT. Incore), dan tim Panel Harga Pangan dari Provinsi Bali. Uji coba ini mencakup penjelasan langkah-langkah penggunaan aplikasi, mulai dari proses login hingga penginputan data, termasuk cara memberikan alasan ketika harga yang dilaporkan melebihi atau kurang dari batas yang ditetapkan, serta saat tidak ada pemantauan. Secara umum, sebagian besar enumerator berhasil melakukan login dan menginput data harga, tetapi masih ada beberapa yang mengalami kesulitan karena nomor handphone mereka tidak terdaftar. Untuk meningkatkan pemahaman enumerator, tim Incore berencana untuk membuat atau memperbarui manual book dan video dengan tampilan mobile agar enumerator dapat lebih mudah memahami fitur-fitur yang akan mereka gunakan di lapangan.

- d) Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pasar Citeureup 2, Kab. Bogor
Monitoring dan evaluasi terhadap Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Pengawasan Keamanan Pangan Segar dipimpin oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, melibatkan tim dari berbagai instansi seperti PPSKMP, SPHP, DCP, serta perwakilan dari Dinas terkait di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Dalam pengujian keamanan pangan segar, dilakukan rapid test pada beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabai, dengan hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat residu pestisida. Di Pasar Citeureup 2, harga komoditas pangan cenderung stabil, meskipun ada penurunan pembelian daging ayam ras akibat kenaikan harga dan persaingan dengan pedagang lain.

Distributor beras PT. Amtaza Syahla Bersama memiliki stok beras SPHP dan premium yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Sementara itu, Gudang Bulog Dramaga, yang sedang dalam proses renovasi, mengalihkan stok untuk penyaluran bantuan pangan, dan memastikan stok beras SPHP cukup untuk distribusi ke wilayah sekitarnya. Gudang ini juga menyimpan berbagai komoditas pangan lainnya, termasuk gula dan minyak goreng.

- e) Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pasar Laris Cibodas, Kota Tangerang
Monev Pasokan dan Harga Pangan Strategis serta Pengujian Keamanan Pangan Segar di Pasar Laris Cibodas Kota Tangerang dilaksanakan pada Kamis, 8 Agustus 2024. Monev dipimpin oleh Kepala Pusdatin Bapanas, diikuti oleh Kadis Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Pinca Bulog Tangerang, Dirut PD Pasar Kota Tangerang dan didampingi Perwakilan Satgas Pangan, DKP Prov. Banten, pengelola pasar, media, tim Dit. PPSKMP, tim Dit. SPHP, tim Pusdatin, dan tim humas Bapanas. Harga komoditas pangan di Pasar Laris Cibodas saat monev relatif stabil dengan ketersediaan cukup aman, antara lain sebagai berikut: Beras SPHP: Rp 12.400/kg (pasokan dari agen/distributor 50pack/minggu, rata2 penjualan 10pack/hari), Beras medium: Rp 13.750 - 16.250/kg, Beras Premium: Rp 17.500 - 18.750/kg, Baput: Rp 40rb/kg, Daging Ayam Ras: Rp 45rb - 50rb/kg, Daging sapi Rp 130rb/kg, Minyak Premium: Rp 17.500/liter, Minyak Curah: Rp 18rb/kg, Gula konsumsi: Rp 18rb/kg, Terigu: Rp 12rb/kg, Garam: Rp 12rb-18rb/kg, Ikan Kembung: Rp 40rb/kg, Ikan Tongkol: Rp 35rb - 40rb/kg, Ikan Bandeng: Rp 40rb - 45rb/kg Beberapa komoditas pangan di Pasar Laris Cibodas mengalami kenaikan antara lain: CRM : Rp.70rb/kg; CMK : Rp 50rb/kg; Minyakita : 15,5/liter - 16,5/liter (naik).

Sementara beberapa komoditas pangan yg mengalami penurunan antara lain Bawang Merah: Rp25rb/kg dan Telur : Rp 26rb/kg Pengujian keamanan pangan segar mencakup pengujian cepat atau rapid test yg dilakukan pada komoditas : Cemarkan Pestisida: CRM, CMK, CMB, Tomat, Wortel, Bamer, Baput dan Cemarkan Formalin: Ayam, Ikan Kembung. Hasil pengujian untuk setiap komoditas dinyatakan negatif (tidak mengandung cemarkan pestisida atau formalin). Kondisi Pasar Laris Cibodas cukup sepi karena masyarakat terbagi ke pasar pagi dekat sekolah dan pasar sore di wilayah laris Cibodas.

Penjualan pangan relatif turun karena daya beli masyarakat yg turun di periode ajaran baru sekolah. Diharapkan kondisi dapat normal setelah 1 bulan.

- f) Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pasar Tambun, Kab. Bekasi Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan serta Pengujian Keamanan Pangan dilakukan secara terpadu dipimpin oleh Deputy 2 Bapanas didampingi oleh Satgas Pangan Pusat, Pimpinan Cabang BULOG Karawang, Kabid Ketersediaan dan Distribusi Provinsi Jawa Barat, DKPPP Kab.Bekasi, serta tim dari Badan Pangan Nasional (Direktorat SPHP, Direktorat PPSKMP dan tim Humas).

Berikut harga beberapa komoditas bahan pangan yang ada di Pasar Tambun: Telur Ayam Ras: 27.000/kg, Cabai Merah Keriting: 42.000/kg, Cabai Rawit Merah: 70.000/kg, Bawang Merah Brebes: 25.000/kg, Bawang Putih: 42.000/kg, Daging Ayam: 33.000/kg, Daging Sapi: 140.000/kg, Beras Premium 15.000/kg, Beras Medium 12.000/kg, Garam 16.000/kg, Gula Curah 17.600/kg, Gula Pasir Kemasan 18.000/kg, Tepung Terigu 10.000/kg, Minyak Kita Rp 15.500/L.

Kondisi Pasokan dan Harga Pangan terpantau dalam kondisi yang aman. Hanya Minyak Kita yang mengalami kenaikan Rp 500 dari minggu sebelumnya. Beberapa komoditas lain terpantau mengalami penurunan dalam 1 minggu terakhir diantaranya Cabai Rawit Merah (turun Rp 10.000), Cabai Merah Keriting (turun Rp 3.000), Bawang Merah (turun Rp 3.000), Bawang Putih (turun Rp 3.000), dan Telur Ayam Ras (turun Rp 1.000).

Beras SPHP dalam 2 bulan terakhir tidak dijual di Pasar Tambun. Informasi dari BULOG Cab.Karawang, untuk saat ini pasokan beras dari petani aman, dan harga beras sedang bagus sehingga untuk penyaluran beras SPHP dikurangi/dihentikan untuk sementara waktu. Namun jika nantinya pasokan beras dari petani turun dan harga naik, maka beras SPHP akan disalurkan kembali. Ada 2 pengujian yang dilakukan diantaranya Uji Formalin dan Uji Pestisida.



Uji Formalin dilakukan pada komoditas Daging Ayam Ras dan Ikan Kembung. Sedangkan, Uji Pestisida dilakukan pada komoditas Wortel, Tomat, CRM, CMK, Bawang Merah, dan Bawang Putih. Hasil dari pengujian tersebut didapat bahwa tidak ditemukan formalin pada Daging Ayam Ras dan Ikan Kembung, dan tidak ditemukan pestisida pada Wortel, CRM, CMK, Bawang Merah, dan Bawang Putih.

g) Monev Kegiatan SPHP dan Percepatan Anggaran

Monev dilakukan di berbagai provinsi, seperti Banten, DIY, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi terkait realisasi dana dekonsentrasi, update kegiatan GPM serta SiGempur dan Kios Pangan bersama Dinas Ketahanan Pangan provinsi terkait yang menangani kegiatan SPHP serta Tim SPHP. Selanjutnya, dilakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di provinsi terkait.

3. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

a) Perkembangan Pelaksanaan GPM Pusat dan Daerah

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi.

SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2024 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (volatile foods) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 telah dilaksanakan sebanyak 677 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 19 kali, provinsi sebanyak 139 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 519 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Agustus 2024 sebanyak 6.780 kali dengan rincian Pusat sebanyak 166 kali, Provinsi sebanyak 1.087 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 5.527 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

b) Perkembangan Penyaluran Beras SPHP Periode Agustus 2024

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp10.900/kg untuk wilayah zona I. Berdasarkan laporan update tanggal 31 Agustus 2024 realisasi SPHP beras di tingkat konsumen selama Bulan Agustus sebesar 110.069.667 kg. Total realisasi secara nasional dari Januari hingga akhir Agustus sebesar 1.038.565.009 kg atau setara 86,55% dari target penyaluran Tahun 2024 sebanyak 1.200.000.000 kg. Realisasi Penyaluran terdiri dari Pengecer sebesar 656.061.517 kg atau 63,17%, Distributor sebesar 328.913.538 atau 31,67%, Satgas pangan sebesar 37.076.771 atau 3,57%, Pemda sebesar 13.397.489 atau 1,29% dan BUMN sebesar 3.115.695 atau 0,3% hal ini terlihat dalam gambar 9. Penyaluran beras SPHP melalui PIBC guna mengisi kebutuhan pasar dan menekan lonjakan inflasi. Ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar terus memperluas cakupan beras Bulog, sehingga dapat lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

c) Gerakan Pangan Murah

- GPM Polbangtan

Kegiatan GPM dilaksanakan di Halaman Kampus Polbangtan Bogor pada 1-3 Agustus 2024 dan dihadiri oleh Direktur, Ketua Tim Kerja SDM & TU, Tim Polbangtan, Mahasiswa/i Polbangtan, serta warga setempat. Acara ini bersamaan dengan Pameran Agriculture dan Jobfair Mitra Bapanas yang diikuti oleh Perum BULOG, Puspa Tampian, Mitra UMKM Kota Bogor, dan UMKM binaan Polbangtan. Komoditas yang diminati warga termasuk Beras SPHP, Telur Ayam, Bawang Merah, dan Minyak Goreng.

Omzet hari pertama mencapai Rp. 21.429.000, sementara pada hari kedua yang bertepatan dengan Wisuda Mahasiswa Polbangtan, total omzet mencapai Rp. 43.850.000. Rangkaian kegiatan ini sangat diminati, dan Puspa Tampian menyarankan agar acara serupa rutin dilakukan dengan Polbangtan.

- **GPM di Kota Bandung**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menggelar acara GPM bekerjasama dengan Dinas Sejarah TNI AD berlokasi di Kantor Dinas Sejarah TNI-AD, Jalan Belitung Nomor 6, Kota Bandung. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu upaya untuk upaya pengendalian inflasi di Kota Bandung dan dlm rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-79. Acara GPM ini dihadiri PJ.

Setda Pemkot Bandung, Direktur SPHP, Kadis Sejarah TNI AD, Pinca BULOG Bandung, Kadis DKPP Kota Bandung, dan Perwakilan DKPP Provinsi Jabar. Tingkat inflasi di level nasional dan kota/kabupaten mengalami penurunan. Pada bulan Juli 2024, inflasi nasional dilaporkan turun dari 2,51% jadi 2,13%, lalu inflasi di Jawa Barat dilaporkan turun dari 2,38% jadi 2,25%. Adapun inflasi year on year Kota Bandung pada Juli 2024 dilaporkan berada di angka 1,94% turun dari 2,10%. Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, mengapresiasi langkah Pemkot Bandung dalam menghadirkan kebutuhan pokok murah. ini memberi sumbangsih untuk penurunan inflasi di Kota Bandung. Tingkat inflasi di level nasional dan kota/kabupaten mengalami penurunan. Pada bulan Juli 2024, inflasi nasional dilaporkan turun dari 2,51% jadi 2,13%, lalu inflasi di Jawa Barat dilaporkan turun dari 2,38% jadi 2,25%. Adapun inflasi year on year Kota Bandung pada Juli 2024 dilaporkan berada di angka 1,94% turun dari 2,10%.

Mitra GPM yang ikut berpartisipasi yaitu: Bulog Cab Bandung, ID.Food, Poktan Hataki (sayuran serba 5 ribu), Sunpride (buah segar), Fajar Meat (daging sapi frozen), Pinsar (ayam potong), Gerai Kartika 88 (sembako), Gapoktan Padasuka (beras premium), Golden Mom Indonesia (telur), Agris (bawang, kentang, wortel, cabai) dan UMKM Olahan Pangan.

Harga Penjualan komoditas pangan terdiri dari: Beras SPHP (58.000/5kg); Beras Medium (65.000/5kg); Minyak goreng Kita (15.500/Lt); Bawang merah (20.000/kg); Bawang putih (37.000/kg); Minyakita (15.500/L); ayam utuh (30.000/ekor); telur ayam (25.000/kg); cabai rawit merah (57.000/kg); daging sapi (97.000/kg); cabai keriting merah (45.000/kg); cabai keriting hijau : (30.000/kg); cabai tanjung: (50.000/kg)' kentang (20.000/kg); danAneka Sayur 5.000/pack.

4. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan).

Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan Agustus 2024 sebagai berikut: beras dari Kab Banggai ke Kab. Banggai Kepulauan sebanyak 6.000 kg, cabai rawit merah dan cabai merah keriting dari champion cabai Indonesia ke Jakarta sebanyak 3.760 kg. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan per tanggal 31 Agustus 2024 sudah terealisasi sebanyak 227,3 ribu ton. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 98 ribu kg.

5. Perkembangan Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan di Kios Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dukungan Pasokan Bahan Pangan ke Kios Pangan bersama Perum BULOG, ID FOOD, PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan PT. Japfa Comfeed Indonesia (JCI) untuk menyediakan pasokan bahan pangan ke outlet-outlet Kios Pangan dengan harga yang terjangkau dan/atau mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) atau ketentuan lain yang berlaku yang diselenggarakan pada Selasa, 9 Agustus 2024 secara daring. Perum Bulog, ID Food, PT CPI, dan PT Japfa akan mendukung pasokan dengan memberikan kontak PIC masing-masing wilayah ke Bapanas yang selanjutnya akan di share ke Dinas Provinsi/Kab/Kota untuk memudahkan koordinasi di daerah. Sebagai tindak lanjut dilakukan rapat lanjutan bersama PT. CPI dan PT. JCI pada Senin, 15 Agustus 2024 dengan hasil PT CPI dan PT. JCI akan mendukung dengan memasok dari kios terdekat yang dimiliki dengan skema pilot project.

Perkembangan Kios pangan posisi per 31 Agustus sebanyak 336 Kios Pangan yang tersebar di 21 Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi dan 86 Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 29 Agustus 2024 dilaksanakan sosialisasi produk perbankan BRI yang akan disinergikan dengan kegiatan SPHP salah satunya Kios Pangan. Aplikasi PARI dapat mengakomodir permasalahan pembiayaan, kemudahan pembayaran melalui QRIS, agen BRI Link untuk vendor atau pelaku usaha lainnya untuk tambahan pendapatan.

Permasalahan yang dihadapi kios pangan, khususnya yang dikelola oleh dinas pangan diantaranya tidak adanya anggaran dan/atau pasokan bahan pangan yang belum dapat terpenuhi secara maksimal, sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan pemasok bahan pangan, serta dengan perbankan untuk permodalan.

Aplikasi Pasar Rakyat Indonesia (PARI) merupakan marketplace yang dapat memfasilitasi

transaksi jual beli bahan pangan. Yang membedakan dengan aplikasi marketplace lainnya adalah komoditas yang ditransaksikan di PARI hanya komoditas pangan. Keuntungan menggunakan aplikasi PARI adalah cashless sehingga terhindar dari risiko uang palsu dan terdapat catatan keuangan. Selain itu ada dana talangan tanpa bunga, tanpa agunan, provisi, notaris, dan prosesnya yang cepat. Pada aplikasi PARI hanya ada biaya layanan sebesar 550 rupiah/1 juta/hari. PARI dapat dimanfaatkan untuk Kios pangan yang terkendala anggaran atau untuk pelaku usaha yang akan memperluas pasarnya (scale up). Selain itu, BRI dengan PARI menawarkan kerjasama dengan menggunakan POS terintegrasi untuk membantu inventori di toko/outlet Kios Pangan seperti keluar masuknya barang, stok, dan inventori lainnya.

1.3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya.

Pada Bulan Agustus 2024, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan distribusi dan cadangan pangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah merupakan langkah awal dan dasar dalam menentukan program-program keberhasilan Ketahanan Pangan Nasional. Peraturan tersebut berisi tata kelola cadangan pangan pemerintah yang berupaya untuk menguatkan Ketahanan Pangan Nasional.

Ruang lingkup tata kelola cadangan pangan pemerintah meliputi ketentuan umum, jenis cadangan pangan, jumlah cadangan pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, penugasan badan usaha milik negara, pendanaan, dan ketentuan peralihan.

Badan Pangan Nasional melalui rancangan peraturannya menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 dengan persyaratan mutu pangan untuk cadangan pangan pemerintah. Rancangan ini sejalan dengan Perpres Nomor 125 yang membahas terkait jenis, jumlah, dan penyelenggara cadangan pangan. Rancangan peraturan ini berupaya untuk menjamin mutu segala jenis pangan untuk cadangan pangan pemerintah. Dalam rancangan ini terdapat analisa terkait standar mutu, cara pengemasan, cara penyimpanan, kriteria turun mutu, dan pelepasan jenis pangan. Pembahasan yang terdapat rancangan tersebut bertujuan dalam menyelesaikan mandat Perpres Nomor 125 tahun 2022 sebagai bentuk upaya mencapai keberhasilan empat komponen ketahanan pangan. Dalam rangka melaksanakan upaya-upaya tersebut diperlukan suatu kajian yang mendasari terutama dalam rangka mereformulasi penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam tata kelola cadangan pangan nasional. Hasil kajian terhadap Reformulasi Cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Cadangan Pangan Indonesia ini harapannya dapat merekomendasikan kepada Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyesuaian perhitungan cadangan pangan yang termasuk di dalamnya adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).

Rekomendasi ini mengacu pada kondisi di setiap daerah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan dan aktivitas kebencanaan. Kajian strategis atau riset mengenai ketahanan pangan dapat memberikan gambaran Badan Pangan Nasional dalam menjalankan dan mengevaluasi kebijakan.

b. **Penyusunan Kajian Cadangan Pangan Nasional untuk Penguatan Ketahanan Pangan Indonesia**

Penguatan cadangan pangan nasional dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi, pelaku usaha, dan kementerian/lembaga terkait, mencakup komoditas strategis seperti beras, kedelai, jagung, gula, daging, dan minyak goreng. Sinergi ini diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan, stabilisasi harga, dan keseimbangan pasokan dari hulu ke hilir. Pemerintah memperkuat peran Badan Pangan Nasional (Bapanas), BULOG, dan BUMN Holding Pangan untuk meningkatkan produksi, ekspor, dan stabilisasi harga.

Prioritas pembangunan RPJMN 2025-2029 menargetkan peningkatan ketersediaan pangan nasional, pengelolaan sistem pangan yang lebih baik, serta pengurangan prevalensi kerawanan pangan dan gizi, sejalan dengan pencapaian target SDGs

Sedangkan NSPK yang telah disusun selama bulan Agustus 2024 yaitu:

- Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan PBP Tahap II Tahun 2024
- Panduan Kegiatan Pengembangan Database Cadangan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024
- Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Juknis DAK Non Fisik TA 2025
- Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan.

2. Kordinasi Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan

- a. **Rapat Koordinasi Konfirmasi Penilaian DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025**
- Dalam rangka konfirmasi penilaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2024 secara online meeting. Tindak lanjut rapat tersebut adalah Kabupaten/Kota yang tidak hadir dalam zoom meeting akan dihubungi secara langsung yaitu Pulang Pisau, Sumbawa, Lombok Tengah, Nganjuk, Wonogiri, Grobogan, Klaten, Majalengka, dan Kuningan.

Dinas Kabupaten/Kota akan segera memperbaiki dan melengkapi dokumen pengusulan DAK Non Fisik, sehingga pada saat pembukaan pembahasan mulai tanggal 17 s.d. 23 Agustus 2024 dapat langsung di-upload pada Aplikasi KRISNA.

b. Rapat Koordinasi Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2024

Tujuan dari rapat sosialisasi petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan tahap ketiga tahun 2024 adalah sebagai bukti bahwa Badan Pangan Nasional telah melakukan sosialisasi terkait penyaluran bantuan pangan tahap ketiga kepada seluruh stakeholders. Rapat dilaksanakan dalam 2 sesi, Sesi pertama di hadiri oleh PT.

POS Indonesia dan PT. BGR Logistik, Sesi kedua dihadiri oleh PT. YAT dan PT. JPL. Adapun kesimpulannya sebagai berikut

- Pelaksanaan rapat sosialisasi penyaluran bantuan pangan tahap ketiga tahun 2024 ini diharapkan seluruh petugas lapangan dari transporter sudah memahami dengan baik mekanisme penyaluran serta dokumen-dokumen penyaluran yang harus dilengkapi.
- Berdasarkan hasil rapat ini diketahui bahwa transporter belum mendapatkan pemahaman yang utuh atas petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan tahap ketiga tahun 2024 dari Perum BULOG

c. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2024

Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan Tahap Ketiga Tahun 2024 bertujuan untuk membahas percepatan penyaluran bantuan pangan tahap ketiga pada provinsi yang belum menyalurkan dan realisasinya masih rendah. Oleh karena itu, tindak lanjut rapat adalah Bapanas akan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa apabila dalam penyaluran ditemukan PBP yang tidak memenuhi kriteria definisi PBP, contoh ASN, perangkat daerah, masyarakat yang telah memiliki penghasilan yang cukup mampu memenuhi kebutuhannya maka dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme SPTJM.

d. Rapat Koordinasi Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801)

Rapat dilaksanakan dalam rangka koordinasi Laporan Keuangan Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801). Beberapa poin penting hasil rapat koordinasi sebagai berikut: Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan menyampaikan beberapa hal terkait percepatan pembayaran bantuan pangan, likuidasi utang, dan usulan anggaran tambahan untuk 2024. Fokusnya pada penyelesaian pembayaran Bantuan Pangan Beras Tahap 1 dan 2 serta pencatatan bantuan pangan ayam dan telur.

- Kepala Biro PKH, Bapanas mengharapkan percepatan reviu likuidasi dari APIP dan menjaga jadwal pembayaran hingga akhir 2024.
- Kepala KPPN Jakarta V, DJPb menjelaskan prosedur penerbitan SP2D berdasarkan nominal, serta pengajuan dispensasi RPD dan memastikan selisih dalam laporan keuangan likuidasi diselesaikan.
- Kepala Biro KPU, Bapanas menjelaskan pencatatan bantuan pangan daging ayam dan telur serta proses likuidasi sementara Satker Direktorat DCP.
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb menawarkan dua opsi pencatatan beban bantuan pangan ayam dan telur untuk tahun 2023 dan 2024, dengan saran untuk mencatatnya sebagai beban 2024.
- Direktorat Anggaran Bidang Polhukam dan BA BUN, DJA menyoroti penelaahan ABT dan penyesuaian hutang yang belum terbayar di 2024.
- APIP Bapanas menyampaikan LHR untuk penyaluran Bantuan Pangan Beras dan proses likuidasi, serta menunggu reviu akhir likuidasi untuk penyelesaian utang ke Satker Bapanas.

3. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 bagi 22 | Laporan DCP Bulan Agustus Tahun 2024 Komoditas Beras, Daging Unggas, dan Telur Unggas sebagai antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan dan gizi, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan.

Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG dan BUMN Pangan akan kembali melakukan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan pada tahun 2024 dengan rincian penyaluran sebagai berikut :

- Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Beras @10 kg/Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan waktu penyaluran selama 6 (enam) bulan terdiri dari Tahap 1 pada Bulan Januari s.d. Maret, Tahap 2 pada bulan April s.d. Junei, dan Tahap 3 pada Bulan Agustus, Oktober dan November 2024; dan
- Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Daging dan Telur Ayam yaitu paket @1 ekor (0,9-1kg) daging ayam ras dan @10 butir telur ayam ras untuk 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan waktu penyaluran selama 6 (enam) bulan terdiri dari Tahap 1 pada Bulan Januari s.d. Maret dan Tahap 2 pada bulan April s.d. Agustus.

4. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat

Badan Pangan Nasional telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat. Secara garis besar, perbadan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat perlu dilakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dalam mekanisme pelaksanaannya, penyaluran CPP untuk bencana alam dan keadaan darurat melibatkan prioritas penyaluran CPPD Kabupaten/Kota dan CPPD Provinsi. Jenis bencana yang diatur dalam perbadan dan dapat dikategorikan sebagai kejadian yang memerlukan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan terdiri dari Bencana Alam (seperti : Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, dan Likuifasi), Bencana Non Alam (seperti : Gagal teknologi, Gagal Modernisasi, Epidemi, dan Wabah Penyakit) dan Bencana Sosial (seperti : konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror).

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat Tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

Hingga Bulan Agustus 2024, Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Perum BULOG, BUMN Pangan, Dinas Urusan Bidang Pangan Kabupaten/Kota dan Provinsi telah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah berupa Bantuan Pangan Beras dengan total sebanyak 378,21 ton (penyaluran di bulan Agustus sebanyak 11,45 ton) yang tersebar di 21 Kab/Kota pada 20 provinsi dengan jenis bencana sebagian besar berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi dan erupsi gunung merapi.

5. Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Sebagai integrasi data cadangan pangan nasional yang meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Updating database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id), per 30 Agustus 2024, pelaporan stok/cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD).

Pada Bulan Agustus, cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dikelola mayoritas masih berupa cadangan beras pemerintah daerah. Berdasarkan pelaporan melalui sigapnasional.badanpangan.go.id, untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke III Agustus 2024 dengan total sebesar 7.119,183 ton tersebar di 30 provinsi. 7 (tujuh) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua. Sedangkan Provinsi Bali sudah memiliki regulasi, namun belum mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan CBPD.

6. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana dan prasarana logistik pangan tahun 2024, Badan Pangan Nasional kembali memperkuat penyediaan fasilitas sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara sebanyak 13 (tiga belas) unit berupa 2 unit *cold storage* Unggas, 6 Unit *Air Blast Freezer*, dan 5 Unit *Reefer Containnaer* untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Per bulan Agustus, kegiatan penguatan sarpras 2024 yang dilakukan terkait dengan penguatan sarpras tersebut masih dalam tahap penyiapan longlist usulan CPCL, sosialisasi kegiatan 2024, serta koordinasi dengan dinas pangan provinsi untuk penjangkaran CPCL.

7. Kegiatan Pengembangan Database Cadangan Pangan Nasional

Untuk mendukung peningkatan sistem cadangan pangan nasional, Badan Pangan Nasional (NFA) mengembangkan integrasi data dan informasi cadangan pangan yang mencakup Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Pengelolaan CPP melibatkan Perum Bulog untuk beras, jagung, dan kedelai, sementara CPPD dikelola oleh pemerintah daerah dengan dukungan NFA. Pada 2024, NFA memperbarui dan memperbaiki sistem informasi web Sigapnasional untuk mengintegrasikan data cadangan pangan dari seluruh Indonesia. Data yang diinput mencakup stok pangan, pengadaan, penyaluran, dan kebutuhan pangan dari berbagai level pemerintah dan masyarakat. Pengembangan ini bertujuan menjaga ketahanan pangan, mengantisipasi krisis, serta mendukung kerjasama internasional

2. Kegiatan Kerawanan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan realisasi anggaran pada bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp. 8.822.902.194,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

2.1 Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut

1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

a) FGD Pembahasan Perbaikan Indikator FSVA

FGD Pembahasan Perbaikan Metodologi FSVA dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2024 di Hotel Aston Priority Simatupang. FGD bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Pakar dan Kementerian/Lembaga lain tentang metodologi baru untuk penyusunan FSVA. Berdasarkan masukan dari pakar dan Tim Penyusun FSVA, WFP serta diskusi peserta pertemuan menyepakati indikator sebagai berikut:

- a) Aspek ketersediaan: rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan dan Rasio konsumsi normatif protein hewani per kapita terhadap produksi bersih pangan sumber protein,
- b) Aspek akses pangan: Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, Coeficient of Variance harga komoditas (Beras, Daging ayam, Telur, Minyak goreng), Prevalence of Undernourishment (PoU), Persentase kondisi jalan rusak berat terhadap panjang jalan total
- c) Aspek pemanfaatan: Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke Air bersih, skor PPH, Stunting, Persentase sertifikasi keamanan pangan (pangan segar, siap saji dan pangan olahan) dengan yang terdaftar
- d) Aspek resiliensi: Skor kebencanaan (Skor Indeks risiko bencana), Kelembagaan cadangan pangan dan Persentase CPPD yang dimiliki terhadap CPPD ideal, Jumlah hari tanpa hujan dan jumlah milimeter hujan
- e) Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan:
 1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melakukan pengumpulan data indikator yang telah disepakati.

2. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan meminta tanggapan dan masukan dari daerah (Prov dan Kabupaten/kota) atas ketersediaan dan operasional data atas indikator penyusun FSVA pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dilanjutkan dengan exercise penyusunan FSVA

b) Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan

Pertemuan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, secara hybrid di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Pertemuan bertujuan untuk: (1) Mendapatkan masukan dan dukungan data serta informasi khususnya dalam penyusunan FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (2) Penandatanganan kerja sama antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam rangka pencegahan dan kerawanan pangan. Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan:

1. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA bersama Fakultas Pertanian UGM akan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
2. OPD Pangan Prov/Kabupaten/kota akan menyediakan data calon indikator baru penyusunan FSVA.
3. Hasil pembahasan indikator baru akan dibahas lebih lanjut dengan tim pakar

c) FGD Tindak Lanjut Reviu Metodologi FSVA 2025

Dalam FGD dibahas poin-poin pembahasan yang meliputi: (1) Kombinasi indikator dinamis dan statis; (2) Tujuan penyusunan FSVA; (3) Kebutuhan FSVA Nasional vs Subnational; (4) Pendekatan sistem pangan dalam metodologi penyusunan FSVA; dan (5) Kesesuaian kebutuhan pemerintahan, pemerintah daerah, dan sektor terkait pemanfaatan FSVA. Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah FGD:

1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk exercise metodologi FSVA 2025-2029.
2. Tim FSVA dan Konsultan WFP akan melakukan exercise dan pertemuan lanjutan untuk pembahasan hasil.

d) FGD Pembahasan Data Ketersediaan Pangan FSVA 2025

FGD dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Hotel Savero Depok dengan tujuan untuk: 1) Validasi data indikator aspek ketersediaan pangan untuk penyusunan FSVA 2024; dan (2) Memperoleh data indikator FSVA yang belum tersedia dari instansi teknis terkait. Dengan hasil diskusi :

- a) Perbaikan data produksi ubi jalar dan ubi kayu dengan menggunakan publikasi Lakin Direktorat AKABI.
- b) Perbaikan data luas puso akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT pada komoditas padi dan jagung
- c) Justifikasi peningkatan atau penurunan komoditas padi dan jagung sebagai akibat perubahan luas tanam dan produktivitas

Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a) Direktorat Teknis akan melengkapi data yang diperlukan paling lambat hari senin tanggal 2 September 2024
 - b) Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA akan melakukan pertemuan koordinasi pada tanggal 3 September 2024 untuk konfirmasi ketersediaan data indikator: 1) Data produksi perikanan tangkap, 2) data jalan, 3) jagung dan sagu dan 4) data jumlah sertifikasi pangan siap saji, pangan olahan, pangan segar, ijin penerapan CPPOB
 - c) Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional akan melakukan exercise data yang telah terkumpul untuk dianalisis.
- e) Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur

Bimbingan teknis dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 Agustus 2024, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat daerah dalam penyusunan FSVA Kabupaten/kota serta mempercepat realisasi dana dekonsentrasi tahun 2024.

Kegiatan bimtek diawali dengan: (a) pemaparan materi terkait penjelasan umum FSVA, percepatan realisasi dana dekonsentrasi FSVA, dan evaluasi FSVA 2023 untuk Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa Timur, (b) praktek meng upload FSVA interaktif, dan latihan pemetaan.

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan

- a) Kunjungan Kerja Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan serta Pengujian Keamanan Pangan

Kunjungan kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 di Pasaar Tambun Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan tingkat konsumen serta pengujian keamanan pangan pada beberapa komoditas. Hasil pemantauan sebagai berikut:

- a. Secara umum kondisi harga pangan di Pasar Tambun Bekasi cenderung stabil dan pasokan tercukupi.
 - b. Pengujian keamanan pangan dilakukan pada beberapa sampel yang meliputi: (1) Uji Formalin dilakukan pada Daging Ayam Ras dan Ikan Kembung; dan (2) Uji Pestisida dilakukan pada Wortel, Cabe Rawit Merah, Cabe Rawit Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih. Hasil dari pengujian tersebut didapatkan bahwa semua sampel yang di uji terbebas dari formalin dan pestisida, sehingga aman untuk dikonsumsi.
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu Dinas Pangan Kabupaten Bekasi akan melakukan pengujian keamanan pangan secara berkala.
- b) Monitoring Kegiatan Dana Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12-15 Agustus 2024 di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat, yang bertujuan untuk monitoring kegiatan dalam rangka percepatan kegiatan dekonsentrasi lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2024.

1. Provinsi Jawa Barat

Tim Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan didampingi tim DKPP Jawa Barat melakukan monitoring ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat dengan hasil sebagai berikut:

- Tim DKPP Bandung Barat menyampaikan bahwa Kegiatan penyusunan FSVA di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih berada dalam tahap penginputan data. Direncanakan, Rakor kedua akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dikumpulkan.
- Sebagai langkah kesiapsiagaan, Kabupaten Bandung Barat telah memiliki Perda yang mengatur tentang CPPD, yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2022. Pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat memiliki cadangan pangan sebesar 10 ton, yang kemudian dipertahankan pada jumlah yang sama pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, alokasi CPPD mengalami peningkatan menjadi 33 ton, yang sebagian besar dialokasikan untuk penanganan daerah yang rawan pangan.
- Dalam upaya memenuhi cadangan ideal CPPD di Kabupaten Bandung Barat sesuai Perbadan Bapanas nomor 15 Tahun 2023 sebesar 168 ton, DKPP Kabupaten Bandung Barat telah merancang skema strategis di mana setiap desa diinstruksikan untuk memiliki cadangan pangan minimal 1 ton. Di Kabupaten 18 Bandung Barat, terdapat 165 desa yang akan menjadi target pelaksanaan skema ini. Rencananya, sosialisasi terkait skema tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini.

2. Provinsi Sumatera Barat

Koordinasi terkait percepatan realisasi, secara akrual realisasi dana dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Barat kegiatan KIE Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar 11,64% dan Penyusunan FSVA sebesar 7,38%. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena terkendala SK Bendahara baru terbit pada 1 Juli 2024. Kemudian adanya bencana alam yg memutuskan akses jalan antar provinsi-kabupaten/kota, sehingga pertemuan baru dilaksanakan pada bulan Agustus. Realisasi fisik kegiatan KIE Pengendalian Kerawanan Pangan meliputi: (a) Penentuan lokus, yaitu pada 3 nagari, dan (b) Identifikasi kondisi kerawanan pangan wilayah di lokus terpilih sebagai dasar dalam pembuatan materi KIE.

c) Sosialisasi Rencana Pangan Tahun 2025-2029

Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Hotel BW Luxury Jambi, yang bertujuan untuk:

1. Menyosialisasikan dan menjaring masukan pokok pikiran RPN 2025-2029;
2. Menyosialisasikan rancangan teknokratik RPJPN dan RPJMN 2025-2029; dan
3. Memberi masukan target kinerja pembangunan pangan kepada Pemda, sehingga dapat mendukung program kegiatan ketahanan pangan nasional.

Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah sosialisasi:

1. OPD Pangan Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota se Provinsi Jambi akan menyusun perencanaan pangan bersama stakeholder terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan;
2. Bappeda Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten/kota se Provinsi Jambi akan mengkoordinasikan perencanananaan pangan daerah dalam substansi RPJPD, RPJMD dan RPD, sehingga mendukung pembangunan ketahanan pangan 2025-2029.

d) Rakor Percepatan Realisasi Dana Dekonsentrasi TA 2024

Rapat koordinasi dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2024 di Hotel Salak Heritage Bogor, bertujuan untuk monitoring realisasi fisik dan anggaran dalam rangka percepatan kegiatan dana dekonsentrasi lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2024. Dari hasil diskusi dengan OPD Pangan Provinsi terkait percepatan realisasi dana dekonsentrasi menyepakati: (1) Target realisasi percepatan dana dekonsentrasi Bulan Agustus sebesar 80%, namun untuk kegiatan lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan harus segera dilakukan penyelesaian maksimal pada Bulan September; dan (2) Realisasi fisik pengerjaan KIE 100% di Bulan September dan pengerjaan FSVA tersisa honor serta pencetakan laporan.

- e) Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), OPD, eselon I/II lingkup Badan Pangan Nasional dan stakeholder

3. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan

- b) FGD Koordinasi Penyusunan Draft Rencana Kontingensi Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan

FGD dilaksanakan pada tanggal 27-28 Agustus 2024 di Hotel Ibis Styles Bogor, bertujuan menyusun draft rencana kontingensi program kesiapsiagaan krisis pangan, dan mendapatkan masukan dan informasi terkait penyaluran CPP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat. Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan menyusun draft Petunjuk Teknis Tata Cara penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan berdasarkan masukan dari ahli manajemen risiko dan direktorat teknis terkait.

4. Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan

- a) Penyerahan Simbolis Bantuan Pangan Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran terhadap pangan dan meningkatkan asupan gizi. Lokasi kegiatan dilaksanakan di 22 Desa pada 8 Kabupaten di Jawa Tengah dengan penerima bantuan sejumlah 50 KK/desa atau total sebanyak 1.100 KK yang akan sebanyak 9 kali dalam 9 bulan (9.900 paket). Isi setiap paket adalah beras medium 5 kg, telur ayam 1 kg, daging ayam 1 kg dan susu bubuk 8 sachet. Pada saat ini penyalurannya telah memasuki tahap ke-5.

- b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan. Monitoring dan evaluasi (Monev) Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis dan jumlah paket bantuan yang diterima masyarakat, pemanfaatannya dan menggali informasi lain untuk perbaikan kegiatan IPKP ke depannya. Kegiatan dilaksanakan di beberapa provinsi yaitu: Provinsi Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat

5. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Data Dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan

a) Rapat Pembahasan Hasil Analisis Kerawanan Pangan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan

Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 di Ruang Rapat Nusantara I, Badan Pangan Nasional, dengan tujuan: (1) Memaparkan hasil analisis kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan pada 34 provinsi dan 514 Kabupaten/kota; (2) Diskusi pengembangan hasil analisis sebagai basis pemodelan data *By Name By Address* (BNBA) rumah tangga rawan pangan. Hal-hal yang didiskusikan dalam pertemuan :

- Berdasarkan hasil analisis kerawanan pangan, tim TNP2K memandang proses yang telah dilakukan telah sesuai dan dapat dilanjutkan dengan penyusunan data BNBA rawan pangan.
- Tahapan dalam penyusunan data BNBA rawan pangan meliputi: 1) simulasi model pemeringkatan, 2) validasi awal, 3) validasi lapangan/ groundcheck , 4) simulasi model lanjutan, dan 5) penerapan model pemeringkatan.
- Dalam menentukan indikator kerawanan pangan, tidak menitikberatkan pada expert judgement dari pakar/ahli tetapi difokuskan pada penyusunan protokol data 42 berdasarkan tahapan/proses analisis secara statistik yang dikonfirmasi dengan validasi lapangan.
- Data P3KE masih dapat digunakan untuk pelaksanaan program intervensi TA 2025 meskipun Inpres 04/2022 berakhir di tahun 2024 (terdapat kemungkinan perubahan Inpres yang diperpanjang sampai tahun 2026).
- Pengembangan data BNBA rawan pangan perlu kolaborasi lintas K/L khususnya Kemenko PMK sebagai wali data P3KE dan TNP2K sebagai pengelola datanya, BKKBN sebagai wali data PK, dan BPS sebagai lembaga yang memiliki keahlian teknis dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.

1.4 Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut

1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- a) Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Rilis Agustus 2024)
- Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi.

Penyusunan SKPG bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Agustus, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 1 provinsi (2,63%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi Papua Selatan; 6 sedangkan sebanyak 24 provinsi (63,16%) dalam kategori aman, dan sebanyak 13 Provinsi (34,21%) dalam kategori waspada, yaitu D I Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 1 provinsi (2,63%), 16 provinsi (42,11%) dalam kategori waspada dan 21 provinsi (55,26%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 11 provinsi (28,95%) pada kategori waspada dan 27 provinsi (71,05%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori “rentan”, yaitu: NTT, Sulawesi Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terdapat 8 provinsi (21,05%) pada kondisi waspada, 23 provinsi (60,53%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 42,02% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 56,61% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 23 provinsi (60,53%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 2 provinsi (5,26%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 13 provinsi (34,21%) tidak mengalami bencana.

b) FGD PoU series-3: Parameter Perhitungan PoU (Dietary Energy Consumption/ DEC dan Minimum Dietary Energy Requirement /MDER)

- ❖ Perhitungan PoU: Strategis untuk mengentaskan wilayah rentan pangan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan guna merumuskan kebijakan intervensi rawan pangan.
- ❖ Kerjasama BPS dan Badan Pangan Nasional: Dilaksanakan dengan menggunakan data Susenas untuk indikator pendidikan, kesehatan, dan kerawanan pangan. Survey Susenas dilakukan pada bulan Maret dan September hingga level kabupaten/kota.

- ❖ DEC dan MDER: a. DEC: Batas konsumsi kalori yang cukup untuk hidup sehat; penting untuk mengidentifikasi wilayah rentan pangan. b. Metode PoU: Beralih dari Dietary Energy Supply Based ke Individual Food Intake sejak 2011-2014, lebih akurat. c. Cakupan Survey: 345.000 Rumah Tangga dengan 197 rincian komoditi makanan. d. Uji Coba PoU: Pertama kali pada 2015 menunjukkan nilai tinggi (41%) karena data pendukung yang belum sesuai. e. Distribusi DEC: Berkisar 1000-3000 kkalori, semakin tinggi decil pengeluaran, semakin tinggi DEC. f. Software DEC: Menggunakan SPSS, Stata, dan Stat Transfer. g. Tahapan DEC: Desil pengeluaran, Merging Data Makanan, dan Menghitung Ulang konsumsi kalori. h. Target SDGs: Nilai PoU diharapkan mendekati 0 pada 2030, menandakan Indonesia bebas rentan pangan. i. Estimasi MDER: Berdasarkan struktur populasi, kecukupan konsumsi pangan, dan data survey. j. Tahapan MDER: Menghitung tinggi badan, komposisi penduduk, kebutuhan energi minimum, dan tambahan kalori untuk ibu hamil. k. PoU dan Kualitas Pangan: PoU mengukur ketersediaan pangan, sedangkan kualitas diukur dengan skor PPH.

❖ Tindak Lanjut:

1. FGD lanjutan pada 15 Agustus 2024 mengenai Perhitungan Kurva Normal dan Template Excel PoU.
2. BPS akan membuat kolom Q&A untuk pertanyaan terkait PoU

c) Focus Grup Discussion (FGD) PoU series-4: Perhitungan Kurva Normal CV Pengenalan dan Praktek Template Excel PoU

- Template PoU: Digunakan untuk mengolah Dataset Susenas dengan berbagai software seperti SPSS dan Stata.
- Sheet Pengisian: Terdapat 4 sheet yang harus diisi: Source, MDER, PoU TB-Mean, dan TB.
- Perhitungan PoU: Dapat dilakukan hingga tingkat Kabupaten/Kota menggunakan data dari BPS.
- Perhitungan DEC: Dilakukan menurut kuantil pengeluaran dengan membuat variabel kuantil dan menggabungkannya dengan file Adjustment Kalori.
- Perhitungan MDER: Menghitung proporsi penduduk menurut kuantil, sedangkan PoU dihitung menurut kuantil dengan template PoU. Kurva Normal: Bentuk kurva yang simetris dengan luas rata-rata (mean) ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%.

- Rata-rata dan CV: Data survei konsumsi energi makanan per rumah tangga cukup akurat untuk menghasilkan konsumsi yang biasa. Variasi disebabkan oleh faktor seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas.
- Distribusi Data Kalori: Mempengaruhi bentuk kurva dari sisi skewness dan keruncingan.
- Ambang Batas (Threshold): Melibatkan BMI dan kebutuhan energi normal. PoU mengukur kecukupan asupan energi makanan, sedangkan FIES mengukur akses pangan pada berbagai tingkat keparahan.
- FIES: Memberikan estimasi proporsi populasi yang kesulitan mengakses pangan dan berguna untuk intervensi kebijakan.

d) Focus Grup Discussion (FGD) PoU series-5: Penggunaan dan Peluang Indikator PoU sebagai Database Terpadu ketahanan pangan

Beberapa poin penting hasil pertemuan sebagai berikut:

- Data persentase PoU untuk intervensi pemerintah bisa dimanfaatkan dengan sumber data lainnya dan bisa saling melengkapi selain data dari BPS.
- Data PoU dapat dimanfaatkan sebagai informasi dengan jumlah penduduk yang mengalami kekurangan pangan. Dan digunakan sebagai targeting wilayah prioritas kebijakan pengentasan kerawanan pangan dengan nilai PoU tinggi dan Jumlah Penduduk tidak cukup pangan tinggi.
- Pemanfaatan informasi PoU untuk mencari wilayah prioritas utama sasaran intervensi kebijakan dapat dilakukan dengan analisis kuadran yakni, meliputi: a. Kuadran I, prioritas utama intervensi (PoU di atas nasional dan jumlah penduduk tidak cukup pangan di atas rata-rata); Kuadran II, prioritas ke-2 (PoU di atas nasional namun jumlah penduduk tidak cukup pangan kurang dari rata-rata); Kuadran III prioritas ke-3 (PoU di bawah nasional namun jumlah penduduk tidak cukup pangan lebih dari rata-rata); Kuadran IV wilayah relative aman.
- Penentuan peluang indikator PoU sampai dengan level kecamatan atau desa diharapkan nantinya bisa dipenuhi di tahun depan dengan database terpadu ketahanan pangan.
- Penggunaan Database terpadu dalam bentuk dashboard bisa diakses oleh OPD Pangan yang digunakan untuk merancang kegiatan program dan menentukan keluarga KPM berdasarkan IKU Badan Pangan Nasional. Sehingga intervensi yang dirancang lebih tajam lagi

- Terdapat kendala terkait data sampai kecamatan/desa belum terpenuhi akibat survei yang dilakukan pada level estimasi yang rendah (hingga kecamatan desa) akan menghasilkan error yang tinggi dan keakuratan datanya sangat rendah karena ada syarat statistik yang tidak bisa dipenuhi. 7. Metode SAE bisa dilakukan untuk menghitung estimasi indikator PoU pada level 18 kecamatan, namun pada level desa masih belum memungkinkan karena hanya sedikit sample Susenas yang tersedia.
- Pemberian intervensi dari PoU juga bisa dikolaborasikan dengan skor PPH, karena keterikatan konsumsi berpengaruh dengan keberagaman nutrisi yang dikonsumsi.

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

a. Terus Gaungkan Gerakan Selamatkan Pangan, NFA Dukung Peran Lembaga Riset Kaji Penerapan Sirkular Ekonomi Penyelamatan Susut Dan Sisa Pangan

Dalam upaya penyelamatan pangan, Badan Pangan Nasional selalu mengedepankan kolaborasi dengan sektor pentahelix, salah satunya peran akademisi. Melalui hasil kajian Dr.Agr.Didit Okta Pribadi, M.Si selaku koordinator riset mengatakan bahwa pemerintah sangat terbantu dalam menyusun rekomendasi dan masukan kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan penyelamatan pangan untuk masyarakat. Dalam hasil studi menunjukkan bahwa telah ada inisiatif sirkular ekonomi di tingkat daerah khususnya wilayah perkotaan. Inisiatif ini muncul berangkat dari isu ketahanan pangan dan lingkungan hidup dibarengi dengan tumbuhnya aktor sirkular yang mengembangkan bisnis sirkular. Menanggapi inisiatif tersebut, Badan Pangan Nasional mewadahi partisipasi publik dengan menyusun rancangan regulasi untuk menciptakan tata kelola yang implementatif untuk penyelamatan pangan.

b. Sosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan, NFA Ajak ASN Menjadi Agen Perubahan Stop Boros Pangan

NFA menghimbau ASN untuk berperan menjadi agen perubahan Stop Boros Pangan dalam rangka Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan dan Pengurangan *Food Loss and Waste*. Hal ini disampaikan Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) saat menjadi narasumber pada Seri Webinar #73 KORPRI Menyapa ASN dengan Tema: Ayo Stop Boros, Kamis (8/8/2024). Webinar dibuka oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH yang diikuti 1000 peserta zoom meeting dan 18.479 orang melalui kanal Youtube.

c. Wakili Indonesia dalam APEC Peru 2024, NFA Bagikan Praktik Baik Penyelamatan Pangan

Indonesia berkomitmen mengurangi *Food Loss and Waste* (FLW) melalui Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (NFA), bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam workshop di APEC Food Security Ministerial Meeting 2024 di Peru, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA, Nita Yulianis, menjelaskan bahwa GSP melibatkan model kolaborasi pentahelix (Academics, Business, Community, Government, Media) untuk mencegah dan mengurangi FLW. Indonesia memulai upaya penyelamatan pangan sejak 2022 di tingkat pusat, berkembang hingga mencakup 15 provinsi pada 2024.

Komponen GSP meliputi kebijakan, sosialisasi, edukasi, aksi penyelamatan pangan, dan pengumpulan data. Selama dua tahun terakhir, NFA mengapresiasi semua pihak yang berperan dalam pencegahan dan penurunan FLW, dengan hasil kajian Bappenas menunjukkan bahwa FLW di Indonesia berkisar 23-48 juta ton per tahun, menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 551 triliun. Chief Economist FAO, Maximo Torero, menekankan bahwa FLW masih menjadi tantangan global yang memerlukan solusi bersama.

d. Momentum Perjuangan Melawan Kelaparan, NFA : Moralitas Pangan Merupakan Sikap dan Perilaku dalam Menghargai dan Menggunakan Pangan secara Bertanggung Jawab

Badan Pangan Nasional (NFA) hadir dalam Rembug Pangan pada Kongres ke-3 Jaringan Bank Pangan Indonesia, yang mengusung tema "Bank Pangan Mengantarkan Indonesia Merdeka 100%". Acara ini menekankan pentingnya moralitas pangan untuk mengatasi food loss dan food waste di Indonesia. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, mengajak masyarakat menghargai makanan dan mengelolanya dengan bijak, serta berkolaborasi untuk menciptakan sistem pangan berkelanjutan. CEO Foodbank of Indonesia (FOI), Hendro Utomo, menyampaikan peran FOI dalam memperluas akses pangan bagi masyarakat rentan, dengan tujuan mencapai kemandirian pangan untuk semua warga. Kongres ini juga menjadi momen refleksi atas peran FOI selama 9 tahun dalam memerangi kelaparan dan mendukung kemakmuran masyarakat.

e. APEC FSMM9 Peru: Indonesia Inisiasi Prinsip Pencegahan dan Penurunan Food Loss and Waste

Penyelamatan dan donasi pangan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia disepakati menjadi salah satu dari tujuh prinsip pencegahan dan penurunan Food Loss and Waste (FLW) dalam The 9th Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Food Security Ministerial Meeting (FSMM9) di Peru pada Agustus 2024. Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA, menekankan pentingnya prinsip ini untuk

menyalurkan pangan berlebih kepada yang membutuhkan. Prinsip ini melengkapi enam prinsip lain yang menekankan efisiensi, seperti kemitraan publik-swasta, penelitian, dan promosi investasi infrastruktur. Indonesia memaparkan kebijakan terkait, termasuk Gerakan Selamatkan Pangan 2022-2024, serta mendukung capaian strategis APEC. Pada pertemuan "Public-Private Partnership Retreat", dibahas kemitraan publik-swasta yang lebih erat dalam mendukung ketahanan pangan Asia Pasifik, dengan dukungan *Vice Minister of Agrarian Development Peru*.

f. Indonesia Bersama 21 Ekonomi APEC Sepakati Deklarasi Menteri pada 9 th Food Security Ministerial Meeting

Sebagai puncak dari rangkaian acara 9th Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Food Security Ministerial Meeting (FSMM) di Trujillo, Peru pada 18 Agustus 2024, Badan Pangan Nasional (NFA) mewakili Indonesia dalam adopsi APEC Food Security Ministerial Statement, yang menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan. Nita Yulianis, ketua delegasi Indonesia, memaparkan isu tantangan pangan global, program prioritas pertanian, serta strategi mengatasi food loss and waste (FLW). Indonesia mencatat penurunan food loss namun peningkatan food waste, yang mendorong pemerintah untuk memperkenalkan peta jalan pengelolaan FLW dan ekonomi sirkular hingga 2045. Melalui kolaborasi regional dan adopsi teknologi Indonesia menargetkan pengurangan FLW sebesar 75% pada 2045. Presiden Peru, Dina Boluarte, menegaskan bahwa ketahanan pangan global memerlukan kebijakan yang efektif dan kolaborasi untuk pencegahan FLW.

3. Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

a. Sinergi dengan AIPGI, NFA Selenggarakan Bimtek GENIUS :Mendorong Pemenuhan Pangan Bergizi Anak Usia Sekolah

Pemenuhan pangan bergizi bagi generasi muda, terutama anak-anak usia dini, menjadi fokus penting untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mendukung tercapainya Generasi Emas 2045. Badan Pangan Nasional (NFA) kembali meluncurkan program Gerakan Edukasi dan Pemberian Makanan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang menyasar 17 ribu siswa SD di 10 provinsi. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) dan meningkatkan status gizi siswa. Program ini bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) untuk mendampingi pelaksanaan dan evaluasi.

Hasil evaluasi 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam status gizi dan perilaku siswa terkait pangan dan gizi. Program GENIUS juga mendukung Gerakan Sekolah Sehat dari Kementerian Pendidikan dalam pemenuhan gizi yang mempengaruhi perkembangan dan kecerdasan anak-anak.

b. NFA Luncurkan Program GENIUS 2024, Sinergi Menuju Generasi Emas 2045

Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang diluncurkan Badan Pangan Nasional (NFA) pada 27 Agustus 2024 di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kegiatan ini bertujuan membangun generasi masa depan yang sehat, kuat, dan produktif, mendukung visi Generasi Emas 2045. Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya ketahanan pangan dan pemenuhan gizi berkualitas bagi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya strategis nasional serta mendukung percepatan penurunan stunting sesuai Perpres 72 Tahun 2021. Program GENIUS, yang menysasar 17 ribu siswa di 92 SD di 10 provinsi, juga mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemborosan pangan melalui kampanye stop boros pangan dan mendorong donasi pangan dari retail dan restoran kepada masyarakat yang membutuhkan. Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, mendukung penuh program ini, sementara Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, menegaskan bahwa pemilihan lokus program didasarkan pada data Prevalence of Undernourishment (PoU) yang menunjukkan penurunan dari 10,21% pada 2022 menjadi 8,53% pada 2023, dengan target penurunan hingga 5% pada 2024.

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp. 4.945.481.092 atau sebesar 40,32%,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

3.1. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan prioritas yang dilakukan sebagai berikut

a. Intervensi Keluarga Berisiko Stunting:

- Dilaksanakan program Rumah Pangan B2SA di Lombok Utara untuk keluarga berisiko stunting, dengan fokus pada balita, ibu hamil, dan calon pengantin dari golongan ekonomi rendah.
- Diberikan bantuan pangan (beras, daging ayam, telur) serta edukasi tentang pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

b Pemantauan Rumah Pangan B2SA:

- Kunjungan ke Rumah Pangan B2SA di Lombok Barat untuk memastikan penyediaan pangan berkualitas dan edukasi guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi anak-anak.

c Festival Jalan Sehat dan Sarapan Bergizi:

- Diselenggarakan oleh Kemendikbudristek di Jakarta, memberikan 700 botol jus sayur dan buah B2SA untuk meningkatkan kesadaran konsumsi sayur dan buah di kalangan pelajar.
- Acara diisi dengan lomba menu sarapan sehat, senam massal, dan permainan tradisional.
- Dihadiri anggota Asosiasi Chef, pengusaha UMKM pangan, dan murid sekolah perhotelan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pangan B2SA.
- Edukasi diharapkan mendorong chef dan pengusaha UMKM sebagai agen perubahan dalam pola konsumsi sehat.

d Lomba Cipta Menu B2SA (Bogor, 13 Agustus 2024):

- Diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, diikuti oleh 38 Tim Penggerak PKK.
- Fokus pada inovasi menu B2SA berbasis potensi pangan lokal, yang dapat diaplikasikan sehari-hari untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

e Festival Pangan Lokal B2SA (Samarinda, 14 Agustus 2024):

- Melibatkan Dinas Pangan dan OPD terkait untuk membangun kesadaran masyarakat akan potensi pangan lokal.
- Kreasi menu B2SA dihasilkan oleh anggota TP PKK dari 10 kabupaten, bertujuan untuk menerapkan pola konsumsi berbasis pangan lokal yang bergizi dan seimbang.

f FGD Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal (Bogor, 15 Agustus 2024):

- Diikuti oleh pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas penganekaragaman konsumsi pangan.
- Diskusi difokuskan pada eksplorasi sumber daya pangan lokal, pemetaan potensi, serta pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam diversifikasi pangan.

g Program Desa B2SA (Tabanan, Bali, 19 Agustus 2024):

- Implementasi program di 100 desa prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka stunting melalui Teras Pangan, Gerai Pangan, dan Rumah Pangan.
- Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat desa dan mengurangi prevalensi stunting.

h Program Rumah Pangan B2SA (Buleleng, Bali, 20 Agustus 2024):

- Dilaksanakan di 175 titik desa prioritas untuk mengatasi masalah stunting dengan menyediakan akses pangan berkualitas.
- Menyasar keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan menyusui, dengan 60 kali pemberian makanan B2SA selama 6 bulan.

3.2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan Mutu Pangan

Kegiatan prioritas yang telah dilakukan sebagai berikut

1) Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan Pangan Segar Batch II

Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan segar, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan berkolaborasi dengan SEAFast Center IPB menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Segar Batch 2 bagi pengawas pangan segar di kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia pada tanggal 5 – 9 Agustus 2024 di Bogor. Bimtek serupa sebelumnya telah sukses dilaksanakan pada batch 1 dengan perwakilan pengawas pangan segar kabupaten/kota dari 33 provinsi di Indonesia.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, menyampaikan bahwa SDM pengawasan pangan merupakan ujung tombak dalam pengawasan pangan segar, pemahaman akan regulasi serta pengetahuan terkait keamanan pangan oleh pengawas pangan segar sangat mendukung pelaksanaan pengawasan pangan segar baik diseluruh wilayah Indonesia. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, namun pengawas pangan berkewajiban menjamin pangan segar yang beredar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Diharapkan peserta bimtek dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya untuk melaksanakan dan memperkuat pengawasan keamanan pangan segar di wilayahnya masing-masing.

2) Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan tentang Batas Maksimal Residu Pestisida

Berikut adalah ringkasan dari kalimat tersebut:

Konsultasi Publik mengenai Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Residu (BMR) Pestisida dalam Pangan Segar diadakan secara hybrid pada 13 Agustus 2024 di Bogor. Pertemuan ini dihadiri oleh pakar, perwakilan dari berbagai lembaga dan asosiasi, serta masyarakat umum, dengan tujuan mengumpulkan masukan publik terhadap rancangan peraturan tersebut. Penyusunan BMR mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis pestisida terdaftar, data regional ASEAN, dan hasil screening residu pestisida di 34 provinsi pada tahun 2023. Ruang lingkup rancangan mencakup ketentuan pengujian dan pengkajian berkala berdasarkan risiko. Rancangan peraturan telah dipublikasikan di situs web Bapanas, dan masukan publik dapat disampaikan hingga 30 Agustus 2024 untuk perbaikan dan harmonisasi lebih lanjut bersama Kemenkum HAM dan kementerian/lembaga terkait.

3) Sampling dalam rangka Kajian Mutu Kayumanis

Sampling dilakukan pada tanggal 12-24 Agustus di 6 provinsi sentra produksi kayu manis, yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Lokasi Pengambilan sampel dilakukan di pasar tradisional, pengepul, dan/atau eksportir. Sampel diambil dalam bentuk utuh (whole), patahan (pieces/cracked/broken), dan bubuk (powder/ground). Sample yang telah diambil akan dikirimkan ke laboratorium untuk dilakukan pengujian yang setelahnya akan dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data. Hasil analisis data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait kayu manis dan untuk menyusun posisi Indonesia atas draft kayu manis yang sedang dibahas dalam forum Electronic Working Group (EWG) *Codex Committee for Spice and Culinary Herbs* (CCSCH) dan *Codex Committee for Contaminant in Foods* (CCCF).

Sebagai Mirror Committee (MC) CCSCH di Indonesia, Badan Pangan Nasional terus berkomitmen untuk mengawal posisi Indonesia dalam penyusunan Draft Standard for Cinnamon. Dengan adanya partisipasi aktif oleh Badan Pangan Nasional, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

4) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sinergitas Penguatan Pengawasan Keamanan Segar

Perjanjian Kerjasama (PKS) dilakukan antara Badan Pangan Nasional dalam hal ini Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Fakultas Pertanian UNSRI, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk membangun sinergitas dan kerja sama penguatan pengawasan keamanan pangan segar daerah guna mendukung penjaminan keamanan pangan segar di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi SDM dan pengujian laboratorium.

PKS berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak. Adapun ruang lingkup PKS meliputi:

- a. menyediakan dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi terkait keamanan pangan segar;
- b. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait keamanan pangan segar;
- c. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang mendukung pengawasan dan penjaminan keamanan pangan segar;
- d. melakukan pembinaan pelaku usaha pangan segar;
- e. melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi terkait keamanan pangan;
- f. melakukan pengujian keamanan pangan segar;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

5) Penetapan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Pedoman Klasifikasi Pangan Segar

Pada tanggal 16 Agustus 2024 telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 528.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 337 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Pangan Segar. Perubahan ini atas dasar terjadinya perkembangan dalam penyusunan standar keamanan pangan sehingga memerlukan penyesuaian atas klasifikasi pangan segar asal tumbuhan. Perubahan dilakukan pada lampiran, di mana terdapat penambahan komoditas pangan yang sebelumnya belum masuk dalam lampiran. Diharapkan pedoman yang telah dirubah ini dapat lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas terkait hal ini.

6) Studi Kerja dan Pembekalan Akhir Peserta Didik Diklat PPNS Bidang Pangan

Dalam kegiatan ini disampaikan materi penegakan hukum di bidang pangan berdasarkan UU Pangan dan aturan turunannya serta contoh-contoh kasus pelanggaran yang terkait penyelenggaraan pangan segar dan investigasinya. Di samping itu, diadakan diskusi termasuk untuk menjaring masukan dari para Calon 13 Laporan Bulan Agustus 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan PPNS Bidang Pangan terkait tindak lanjut dari diklat pembentukan PPNS Bidang Pangan ini ke depannya.

Dalam kegiatan ini, Plt. Sestama menekankan bahwa setelah menjadi PPNS Bidang Pangan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai PPNS Bidang Pangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama diklat. Diharapkan calon PPNS Bidang Pangan semakin memahami tupoksinya dalam upaya penegakan hukum di bidang pangan dengan tegas dan bijak terutama yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya.

Setelah lulus diklat, calon PPNS Bidang Pangan akan mendapatkan sertifikat kelulusan, untuk kemudian diajukan ke Ditjen AHU Kemenkumham untuk dilantik sebagai PPNS Bidang Pangan. Sebagai upaya untuk memayungi pelaksanaan tugas PPNS Bidang Pangan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: akan dibentuk struktur/unit yang mempunyai tugas terkait dengan penyidikan, serta akan dirancang Perbadan dan panduan teknis sebagai pedoman PPNS Bidang Pangan dalam melaksanakan tugasnya.

7) Rapat Komtek Penyusunan RSNi Kernel Beras Fortifikan

Rapat Teknis 2 mengenai Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Kernel Beras Fortifikan diadakan pada 20 Agustus 2024 di Bogor, sebagai kelanjutan dari Rapat Teknis 1 di bulan April 2024. Rapat ini diorganisir oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan dihadiri oleh anggota Komite Teknis 67-11 serta perwakilan dari berbagai lembaga.

Penyusunan RSNi ini bertujuan menjadi acuan untuk standar beras fortifikasi sukarela dan beras fortifikasi untuk bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional, mencakup persyaratan keamanan dan mutu, metode fortifikasi, cara produksi, pengemasan, pelabelan, dan prosedur uji. Rapat sepakat untuk menambahkan vitamin B1, asam folat, zat besi, dan seng pada fortifikasi, dengan bahan baku dari beras atau sumber lokal lain. Direktorat akan memperbaiki draft RSNi dan melaksanakan Rapat Konsensus pada minggu kedua September 2024, dengan rencana untuk memasukkan pedoman fortifikasi beras dalam PNPS 2025 pada Oktober 2024.

8) Penutupan Diklat PPNS Bidang Pangan Tahun 2024

Proses pembelajaran dilakukan melalui metode tatap muka, dengan total 400 jam pelajaran yang meliputi: Pengantar 14 jam Pelajaran; Mata pelajaran Kepribadian 4 jam; Mata Pelajaran Utama 180 jam; Mata Pelajaran Hukum 78 jam; Pembulatan 118 jam; dan lain – lain 6 jam pelajaran. Sementara itu pendidik yang terlibat dalam proses belajar mengajar di masing-masing tingkat berjumlah 54 orang yaitu Diklat Reserse 42 orang; Bareskrim POLRI 5 orang; Kejaksaan 2 orang; Ditjen. AHU Kumham RI 2 orang, dan dari Badan Pangan Nasional 3 orang. Selama pelaksanaan diklat, seluruh peserta telah menunjukkan motivasi dan kesungguhan serta tidak ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi di diklat reserse Lemdiklat POLRI. Seluruh peserta Diklat PPNS yang berjumlah 30 orang telah dinyatakan Lulus dengan kualifikasi Baik.

9) Sosialisasi Regulasi Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan Sosialisasi Regulasi Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2024 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perbadan yang baru diundangkan yaitu Perbadan tentang Batas Maksimal Cemaran dan Perbadan tentang Pengawasan Keamanan Pangan di Peredaran, serta mereviu regulasi terkait lainnya.

Materi yang diangkat dalam kegiatan sosialisasi ini antara lain: Overview Regulasi di Bidang Keamanan Pangan, Perbadan 1/2023 tentang Label Pangan Segar, Perbadan 2/2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label tentang, Perbadan 9/2024 tentang Perubahan atas Perbadan 2/2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar, Klasifikasi Pangan Segar, serta Perbadan 10/2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran.

10) Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Beras Fortifikasi

Setelah proses pengolahan dan analisis data, dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- Persyaratan jumlah zat gizi dalam kernel beras fortifikan direkomendasikan untuk dapat memperhitungkan toleransi kehilangan selama pengolahan minimal, karena hasil kajian menunjukkan adanya penurunan jumlah zat gizi rata rata sebesar 64%.
- Perlu melakukan studi referensi untuk membandingkan dengan hasil penelitian lain yang telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi.

11) Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Mikotoksin pada Pangan Segar

Rekomendasi hasil kajian aflatoksin dan okratoksin pada pangan segar adalah sebagai berikut:

- Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan diharapkan dapat berperan dalam menerapkan praktek penanganan pangan yang baik mulai dari budidaya, penanganan pascapanen, distribusi, penyimpanan dan pengemasan sehingga 19 Laporan Bulan Agustus 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan resiko ada dan berkembangnya aflatoksin dan okratoksin pada pangan segar dapat diminimalisir
- Menggunakan hasil kajian sebagai input dalam penyusunan standar batas maksimal cemaran mikotoksin di peredaran, berdasarkan nilai rekomendasi yang nantinya akan disepakati; dan
- Melakukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif pada daerah dan komoditas pangan aflatoksin dan okratoksin. segar yang banyak terdeteksi cemaran

12) Rekomendasi Hasil Kajian Cemaran Logam Berat pada Pangan Segar Asal Tumbuhan

Berdasarkan data hasil kajian, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menyusun rekomendasi sebagai berikut:

- Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan diharapkan dapat berperan serta dalam menerapkan praktek penanganan pangan yang baik mulai dari budidaya, pascapanen, distribusi, penyimpanan dan pengemasan sehingga tidak menambah risiko adanya cemaran logam berat pada pangan segar

- Menggunakan data hasil kajian sebagai input dalam penyusunan standar batas maksimal cemaran logam berat di peredaran, berdasarkan nilai rekomendasi yang nantinya akan disepakati; dan
- Melakukan pengawasan pangan segar secara berkala agar dapat memperkaya database dan dapat digunakan untuk update/revisi regulasi yang berlaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13) Penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar

Setelah melalui semua tahapan proses penetapan peraturan, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2024, peraturan ini ditetapkan oleh Kemenkumham. Peraturan Badan ini merupakan peraturan yang mengatur kegiatan pengawasan keamanan pangan segar baik di pusat maupun di daerah. Pada awalnya, peraturan ini khusus mengatur pengawasan keamanan mutu pangan daerah, namun akhirnya hasil pembahasan bersama Tim Kemenkumham dan Kementerian Lembaga terkait diputuskan bahwa hal-hal terkait pengawasan keamanan pangan di daerah digabung dengan pengawasan keamanan pangan pusat yang peraturannya sudah ditetapkan lebih dahulu. Dengan dilakukannya perubahan maka pasal-pasal yang mengatur daerah dimasukkan ke dalam batang tubuh peraturan ini.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar belum mengatur mengenai pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar di daerah, sehingga perlu diubah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar diubah sebagaimana Perbadan No. 9 Tahun 2024 yang baru.

14) Penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Tentang batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 ini ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024 dengan tujuan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan batas maksimal cemaran. Untuk tujuan tersebut diperlukan persyaratan batas maksimal cemaran.

Cemaran itu sendiri didefinisikan sebagai bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dan dalam peraturan ini diatur cemaran logam berat, mikotoksin dan mikroba.

3.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama bulan Agustus Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Perizinan Produk (Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar)

a) Penerbitan Sertifikat SPPB PSAT dan Registrasi Izin Edar

Selama bulan Agustus 2024, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menerbitkan 154 Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT-PL) dan 8 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT. Pada periode agustus proses pelayanan atas permohonan yang masuk meningkat sebesar 34.3%, yang berlanjut atas peningkatan penerbitan sertifikat perizinan sebanyak 50.3% namun masih ada permohonan yang tidak memenuhi syarat meningkat sebesar 15.4%.

Selanjutnya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat selama bulan agustus telah melaksanakan audit lapang ke pelaku usaha atas permohonan untuk penerbitan izin edar Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT sebanyak 7 kali ke beberapa kota di Indonesia.

b) Pemberian Keterangan Ahli pada Kasus Dugaan Pelanggaran Perizinan Pangan Segar oleh PT FKS Multi Agro Cabang Lampung

Pada tanggal 9 Agustus 2024 telah dilaksanakan pemberian keterangan ahli pada kasus dugaan pelanggaran perizinan pangan segar oleh PT FKS Multi Agro Cabang Lampung yang dilaksanakan di Dit.Reskrimsus Polda Lampung dengan hasil sebagai berikut:

1. Keterangan ahli pada kasus ini dilakukan oleh fungsional PMHP ahli Madya dan didampingi oleh PMHP dan AKP pertama. Hadir pada kegiatan tersebut Kanit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung beserta jajaran.
2. Kasus ini diawali dengan temuan produk kedelai terkemas ukuran 50 kg yang belum memiliki izin edar PSAT oleh Polda lampung pada Bulan Maret 2024 dan saat ini dalam tahap Penyidikan.
3. Sebelum pemberian keterangan ahli, tim badan pangan didampingi tim ditreskrimsus melakukan peninjauan ke gudang PT FKS, dan diminta untuk menilai secara teknis pemenuhan persyaratan perizinan pangan segar oleh PT. FKS.
4. Berdasarkan penilaian lapang, tim badan pangan melihat bahwa PT. FKS telah melakukan perbaikan gudang sesuai rekomendasi perbaikan audit lapang yang pernah dilakukan tim auditor Badan Pangan Nasional pada bulan Februari 2024 sesuai permohonan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) oleh PT. FKS pada aplikasi Online Single Submission (OSS). Tim menyimpulkan bahwa gudang penyimpanan dan gudang pengemasan yang sudah diperbaiki telah memenuhi standar penerapan penanganan yang baik pada level 2 sesuai regulasi yang berlaku.
5. Badan Pangan Nasional melalui surat No. 401/PK.03.01/D.3/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 pernah memberikan sanksi administrasi berupa "Peringatan 1" kepada PT. FKS untuk segera menyelesaikan perbaikan audit. Perbaikan yang cukup lama terjadi karena adanya perombakan bangunan dan lay out proses penanganan yang cukup signifikan.
6. Berdasarkan sanksi administrasi berupa peringatan yang pernah diberikan Badan Pangan Nasional, tim penyidik Ditreskrimsus menyatakan bahwa kemungkinan kasus ini dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional dan akan ditutup oleh Ditreskrim Polda Lampung, namun sebelum keputusan final tim penyidik akan memanggil PT.

FKS untuk klarifikasi dan meminta keterangan, serta akan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Agustus 2024 7 meminta tanggapan tenaga ahli dari Badan Pangan Nasional yang sebelumnya pernah memberi keterangan yaitu bapak Aprianto Dwi Nugroho terhadap keterangan tim teknis Badan Pangan Nasional hari ini.

c) Rapat Komisi Teknis OKKP Pusat

Rapat ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higiene Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), sehingga proses audit dalam penerbitan SPPB-PSAT dapat lebih obyektif, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Komtek, 8 (delapan) perusahaan direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat SPPB-PSAT. Beberapa rekomendasi Tim Komtek antara lain:

- Memastikan SOP yang dibuat oleh pelaku usaha sesuai dengan yang dilakukan dan efektif untuk mencapai tujuannya; serta diterapkan dan dilakukan pencatatan;
- Memastikan pelaku usaha yang memiliki beberapa gudang cabang untuk melakukan identifikasi dan penandaan produk mutasi atau langsung dari proses impor agar pemberian nomor izin edar sesuai;
- Memastikan proses fumigasi dilakukan oleh pihak yang telah tersertifikasi

d) Rapat Sidang Komisi Teknis SPPB PSAT OKKP Pusat

Kegiatan Rapat Komisi Teknis (Komtek) yang dilaksanakan secara online pada Senin, 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat Komtek dibuka oleh Ketua Tim Kerja Registrasi dan Surveilans dan dihadiri oleh Tim Komtek, auditor terkait, dan fungsional lingkup Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.
2. Rapat ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higiene Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), sehingga proses audit dalam penerbitan SPPB-PSAT dapat lebih obyektif, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perusahaan/pelaku usaha yang diajukan pada Rapat Komtek ini sejumlah 9 (sembilan) perusahaan yang merupakan importir kacang kedelai, kurma, rempah rempah, biji-bijian, dan buah-buahan.

4. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Komtek, 2 perusahaan diterbitkan tanpa catatan, 2 perusahaan yang perlu surveilan lebih awal dan 5 perusahaan diterbitkan dengan beberapa rekomendasi antara lain: - Memastikan pemeriksaan mutu produk dilaksanakan pada saat penerimaan; - Memastikan bahwa pelaku usaha telah menyelesaikan catatan tindakan perbaikan sarana dan prasarana penanganannya dengan melampirkan video yang memperlihatkan keseluruhan kondisi gudang; - Memastikan SOP yang dibuat oleh pelaku usaha sesuai dengan yang dilakukan dan efektif untuk mencapai tujuannya; serta diterapkan dan dilakukan pencatatan.
5. Tindak Lanjut: - Mengintensifkan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) Keamanan Pangan kepada pelaku usaha untuk dapat menerapkan SOP dengan efektif; - Menyampaikan rekomendasi catatan tim komtek untuk diperbaiki oleh perusahaan yang direkomendasikan penerbitan SPPB-PSAT.

e) Temu Teknis OKKP

Hasil pertemuan sebagai berikut

1. Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang PKKP dan dihadiri secara hybrid oleh peserta yang merupakan personel Dinas Urusan Pangan yang menangani perizinan dan pengawasan peredaran PSAT dari 38 provinsi (luring) dan 514 Kab./Kota (daring)
2. Materi dan narasumber sebagai berikut: - "Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Sub Sektor Ketahanan Pangan melalui OSS" oleh Direktur BKPM - "Evaluasi Kegiatan Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Segar" oleh Plt. Direktur PPSKMP, NFA – "Pelaksanaan Perizinan di Bidang Pangan Segar oleh Provinsi dan Kab./Kota" oleh KaUPT PSHP Jatim, Kabid DPPP Kota Pontianak dan Kabid DKP Kab. Bintan - "Pelaksanaan Pengawasan Peredaran oleh Provinsi dan Kab./Kota" oleh Kadis DKP Jateng, Kadis DKP Kota Semarang, Kadis Dispakan Kab. Bandung - "Pentingnya Pengelolaan Manajemen Penjaminan Keamanan Pangan melalui Penerbitan Perizinan" oleh Prof. Sri Rahardjo (UGM) - "Pengukuran Kinerja Keamanan Pangan melalui Penetapan Indeks Keamanan Panga" oleh Prof. Purwiyatno Hariyadi (IPB) - "Mekanisme Penerbitan Perizinan di OSS oleh OKKP Pusat dan Mekanisme pengelolaan SIPSAT" oleh fungsional dit. PPSKMP.

3. Tujuan pertemuan ini, yaitu sinkronisasi program dan evaluasi kegiatan perizinan dan pengawasan peredaran pangan segar.
4. Percepatan dan pemenuhan target perizinan dapat dilakukan melalui komitmen, optimalisasi sumber data, kerja sama ritel, pengawasan, dan penguatan infrastruktur serta sumber daya.
5. Pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan dilakukan untuk mengoptimalkan layanan dan membangun sistem kemamputelusuran.
6. Indeks Keamanan Pangan disusun sebagai gambaran komprehensif kondisi keamanan pangan nasional dengan mempertimbangkan prioritas, kebijakan, evaluasi, dan efisiensi sumber dana, sehingga mampu menciptakan kepercayaan konsumen dan pasar internasional Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Agustus 2024.
7. SIPSAT dikembangkan sebagai platform pelaporan kegiatan pengawasan dan perizinan PSAT, serta database bagi OKKP, pelaku usaha maupun masyarakat dengan menyediakan informasi publik berupa data registrasi/sertifikasi PSAT .
8. Tindak Lanjut oleh OKKPD: - Melakukan upaya percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target waktu dan jumlah yang ditetapkan - Melakukan pendataan pelaku usaha dalam percepatan pemenuhan target perizinan - Menyusun SOP Pelayanan Perizinan yang mendukung optimalisasi layanan dan mampu memenuhi sistem kemamputelusuran - Memberikan masukan dalam penyusunan IKP sesuai kondisi daerah 9. Tindak Lanjut oleh OKKPP adalah Memfasilitasi koordinasi OKKPD, BKPM, dan DMPTSP dalam mengatasi hambatan perizinan di lapangan:

2) Pengawasan Produk dan Pengendalian Produk

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Pengawasan Dan Pengendalian Produk (QIA) atas Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut

- a) Pengawasan dan Monitoring Keamanan Pangan Segar di Pasar Rakyat
- b) FGD Lanjutan Perumusan Indeks Indikator Keamanan Pangan Nasional
- c) Tindak Lanjut Tolakan Ekspor Biji Pala Bubuk PT Gunacipta Multirasa
- d) Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Rumah Kemas Durian terhadap Persyaratan Ekspor Tujuan China

- e) FGD Tindak Lanjut Sampling Beras
- f) Persiapan Evaluasi PAS AMAN
- g) sasi Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan

3) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (Sarana Keamanan dan Mutu Pangan)

- a) Serah Terima Mobil Laboratorium Keamanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara

Pelaksanaan serah terima mobil laboratorium keliling dari Badan Pangan Nasional kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara berlangsung pada 30 Agustus 2024 di lapangan kantor Gubernur Sulut, bersamaan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Bantuan Pangan. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Sestama dan Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulut, dengan dihadiri oleh Sekretaris PKK Provinsi Sulut, Asisten Daerah Bidang Perekonomian, Satgas Pangan, serta jajaran NFA dan Dinas Pangan Provinsi Sulut. Sebelum serah terima, dilaksanakan pelatihan penggunaan rapid test kit untuk 10 petugas Dinas Pangan Sulut dari UPT dan Bidang Keamanan Pangan. Mobil laboratorium keliling dan peralatannya sudah lengkap dan sesuai spesifikasi, meskipun terdapat masalah pada audio microphone yang suaranya belum maksimal. Selain digunakan untuk pengawasan keamanan pangan, mobil ini juga dilengkapi dengan sarana promosi keamanan pangan segar.

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretarian Utama Badan Pangan Nasional, dengan realisasi anggaran pada bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp. 8.629.059.746,- dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

4.1 Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (PKH)

Kegiatan prioritas biro PKH selama bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pelaporan

- a) Revisi DIPA 11, 12 dan 13.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif dan penyaluran pembayaran bantuan pangan beras, daging ayam dan telur pada tahun 2024, maka dilaksanakan revisi DIPA 11,12 dan 13.

Fokus utama revisi DIPA 11 adalah Penambahan anggaran untuk Pembayaran Penyaluran Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap II September-November Tahun 2024 sebesar

Rp359.060.774.000,-

Fokus utama revisi DIPA 12 dalam rangka 1) pengurangan anggaran Fasilitas Distribusi Pangan; 2) pengurangan anggaran Sarana Logistik Pangan; 3) pengurangan anggaran NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 4) pengurangan anggaran Layanan Perencanaan dan Penganggaran; 5) penambahan anggaran Layanan Perkantoran; 6) penambahan anggaran

Layanan Umum; 7) penambahan anggaran Layanan Sarana Internal; 8) penambahan anggaran Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 9) penambahan anggaran Layanan Hukum; 10) penambahan Gerakan Pangan Murah; 11) perubahan akun bantuan pangan menjadi Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311) serta 12) pembukaan blokir Sistem Informasi Intervensi Ketahanan Pangan. Fokus utama revisi DIPA 13 Penambahan anggaran untuk Bantuan Pangan Beras Tahap III Agustus, Oktober, Desember Tahun 2024 (66.012.231 Paket) sebesar Rp9.141.373.749.000,-

b). Penilaian DAK Sub Bidang Pangan

Sebagai bagian dari proses perencanaan DAK Sub Bidang Pangan Tahun 2025, telah dilaksanakan penilaian usulan DAK Fisik pada tanggal 16 Agustus 2024 dan penilaian usulan DAK Non Fisik pada tanggal 30 Agustus 2024.

Dokumen Readiness Criteria sebagai persyaratan pengusulan DAK oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan rincian menu, meliputi :

DAK FISIK

1. Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan

a. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat rehabilitasi laboratorium merupakan OKKPD yang telah memiliki bangunan laboratorium, namun masih perlu dukungan baik sarana dan prasarana. Kriteria penerima manfaat adalah:

- 1) Diutamakan provinsi sentra/penghasil komoditas ekspor;
- 2) OKKP yang telah mengeluarkan penerbitan izin edar dan sertifikat ekspor oleh daerah dan;

- 3) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional dan pemeliharaan laboratorium.
 - b. Kriteria penilaian (readiness criteria) untuk rehabilitasi laboratorium keamanan pangan yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehabilitasi laboratorium;
 - 2) Desain rehabilitasi laboratorium;
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - 4) Data jumlah sumber daya manusia pendukung.
2. Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan
- a. Kriteria Penerima Manfaat Penerima manfaat Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan merupakan OKKPD yang telah memiliki bangunan laboratorium namun masih perlu dukungan baik sarana dan prasarana.
Kriteria penerima manfaat adalah:
 - 1) Diutamakan provinsi sentra/penghasil komoditas ekspor;
 - 2) OKKP yang telah mengeluarkan penerbitan izin edar dan sertifikat
 - 3) ekspor oleh daerah; dan
 - 4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional dan pemeliharaan laboratorium.
 - b. Kriteria penilaian (readiness criteria) berdasarkan hasil kesepakatan Trilateral Meeting, yaitu:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) Surat pernyataan kesanggupan mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - 3) Data jumlah sumber daya manusia pendukung.

DAK NON FISIK

a. Penguatan LPM

- 1) Penetapan penerima manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan LPM tahun 2021-2022;
- 2) Surat komitmen pengisian LPM sebesar 5% dari alokasi DAK Nonfisik yang ditandatangani Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas yang menangani urusan pangan ;

- 3) Rencana penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan LPM ditandatangani oleh Dinas dan ketua kelompok penerima manfaat;
- b. Pengembangan Desa B2SA
 1. Penetapan penerima manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengembangan Desa B2SA;
 2. Usulan rencana penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengembangan Desa B2SA oleh kelompok penerima manfaat diketahui oleh kepala Dinas;
 3. Surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok dalam melaksanakan kegiatan;

3. Penyusunan Konsep Awal Petunjuk Teknis DAK Sub Bidang Pangan

Dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan DAK tematik Sub Bidang Pangan Tahun 2025, telah dilaksanakan penyusunan konsep awal Petunjuk Teknis DAK Sub Bidang Pangan Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Juknis DAK Fisik

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan rapat persiapan penyusunan Petunjuk Teknis DAK Sub Bidang Pangan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, akan dilaksanakan revisi atas Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Salah satu muatan revisi adalah perlunya memasukkan pengaturan atas DAK Fisik Sub Bidang Pangan Tahun 2025 pada lampiran Perpres dimaksud.

Badan Pangan Nasional telah menyampaikan draf Petunjuk Teknis DAK Fisik Sub Bidang Pangan sebagai bagian dari lampiran Perpres melalui surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor : 956/PR.01.02/A.1/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 kepada Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Selanjutnya konsep awal DAK tersebut akan dibahas lebih lanjut pada penyusunan Perpres Petunjuk Teknis DAK Fisik.

- b. Juknis DAK Non Fisik Menindaklanjuti hasil rapat persiapan penyusunan Petunjuk Teknis DAK Sub Bidang Pangan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2024, Kementerian/Lembaga perlu menetapkan petunjuk teknis DAK Non fisik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penyusunan konsep awal Juknis DAK Non Fisik berupa Peraturan Badan Pangan Nasional. Konsep ini menjadi draft awal untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan bersama unit kerja pelaksana DAK Non Fisik, Direktorat Dana Transfer Khusus Kemenkeu, Direktorat Pembangunan Daerah, Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas.
4. Pertemuan Evaluasi eSAKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dengan melakukan penilaian mandiri oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional.

2. Kerja Sama Bidang Pangan, melalui kegiatan:

- 1) Mengikuti Pertemuan Teknis Persiapan Rangkaian APEC Third Committee on Trade and Investment (CTI3) Meetings.
- 2) Mengikuti Pembahasan Dokumen APEC Ministerial Meeting Responsible for Food Security Statement pada APEC-PPFS tahap ke-7.
- 3) Mengikuti Virtual Meeting on the Principles to Prevent Food Loss and Waste (FLW) APEC PPFS tahap ke-7.
- 4) Mengikuti Pembahasan Posisi Pemri atas Tawaran Bergabung pada School Meals Coalition, yang diluncurkan pada UN Food Systems Summit 2021.
- 5) Mengikuti rapat persiapan penyelenggaraan peringatan the International Day of Awareness of Food Loss and Food Waste (IDAFLW).
- 6) Mengikuti pertemuan Komunikasi Publik Indonesia's Second Nationally Determined Contribution, yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 7) Mengikuti rapat persiapan Pertemuan Upgrading ASEAN Trade in Goods Agreement Trade Negotiating Committee (ATIGA TNC) ke-11.
- 8) Mengikuti Rangkaian Kegiatan the 9th APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM9) and Related Meetings (APEC PPFS) di Trujillo, Peru.

- 9) Mengikuti rapat finalisasi draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dengan PT ASDP Indonesia Ferry.
- 10) Melaksanakan fasilitasi keikutsertaan Badan Pangan Nasional pada Kegiatan Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SMEs Expo (JITEX) 2024.
- 11) Mempersiapkan materi penanggap dan mengikuti kegiatan Seminar Wilhan Pasis Dikreg LXIV Seskoad Tahun 2024.
- 12) Mempersiapkan dan menyampaikan materi Kegiatan Strategis dan Data Ketahanan Pangan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Kepresidenan sebagai bahan sambutan Presiden pada kegiatan pemberian Penghargaan Agricola Medal dari FAO kepada Presiden RI.
- 13) Mengikuti rapat persiapan dan melaksanakan fasilitasi penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Gadjah Mada.
- 14) Mengikuti rapat persiapan dan melaksanakan fasilitasi penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Sriwijaya.
- 15) Melaksanakan fasilitasi dan pembahasan rencana kerja sama antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Jember.
- 16) Melaksanakan fasilitasi persiapan dan penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman Antara Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Paguyuban Pasundan, Universitas Pasundan dan PT Dirgantara Indonesia.
- 17) Mengikuti proses dan menyampaikan bahan terkait persiapan pemberian penghargaan Agricola Medal dari FAO kepada Presiden RI.
- 18) Melaksanakan fasilitasi dokumen PDLN dalam rangka mengikuti Rangkaian Kegiatan the 9th APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM9) and Related Meetings (APEC PPFS) yang dilaksanakan di Trujillo, Peru.
- 19) Melaksanakan fasilitasi dokumen PDLN dalam rangka Kunjungan ke Busan Indonesia Center (BIC) dalam rangka melihat potensi kemajuan dan pengembangan sektor ritel terintegrasi dan kerjasama pengembangan teknologi di Korea Selatan
- 20) Melaksanakan fasilitasi dokumen PDLN dalam rangka mengikuti pelatihan Knowledge Co-Creation Program (Country Focus): Country Focused Training for Nutrition and School Meal oleh Japan International Cooperation Agency-JICA di Jepang.

3. Pemberian Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Kegiatan Humas yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 3 Nomor 8, Agustus 2024 dengan isu utama terkait terbitnya Perpres No. 81 Tahun 2024 dalam mendukung Optimalisasi Sumber Daya Lokal. Media NFA disebarluaskan di lingkup internal dan juga stake holder terkait.
- b. Talkshow/ wawancara Kepala NFA di media TV/ Radio pada bulan Juli sebagai berikut :

1 Agustus 2024	CNBC Indonesia	Buka-bukaan Bos Bapanas Solusi Hadapi "Rumitnya" Masalah Pangan RI Bapanas: Impor Bukan Jalan "Utama" Menuju Kemandirian Pangan
26 Agustus 2024	Investor Daily TV	INVESTOR DAILY TALK : Kolaborasi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan
15 Agustus 2024	Investor Daily TV	INVESTOR DAILY TALK : Perkuat Sinergi Wujudkan Kemandirian Pangan
15 Agustus 2024	TVRI Nasional	Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia
22 Agustus 2024	TvOne	Bijak Konsumsi Pangan, Selamatkan Lingkungan

- c. Pada bulan Agustus 2024, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan 29 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut : 17 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 2 isu terkait kerawanan pangan dan gizi, 7 isu terkait penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan 3 isu lainnya.
- d. Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik dan terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.

4.2 Biro Keuangan Pengadaan dan Umum (KPU)

Pada bulan Agustus Biro KPU melaksanakan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut;

a. Rapat entry meeting

Dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Pendahuluan Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian, kegiatan diadakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Bertempat di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian dan melalui Zoom Meeting, kegiatan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Badan Pangan Nasional.

b. Rapat pembahasan PPK

Dalam rangka Pembahasan PIPK Badan Pangan Nasional, kegiatan diadakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang, kegiatan dihadiri oleh seluruh Pokja Keuangan Badan Pangan Nasional

c. Rapat pemaparan hasil Reviu Tindakan lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Badan Pangan Nasional

Dalam rangka Pembahasan PIPK Badan Pangan Nasional, kegiatan diadakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang, kegiatan dihadiri oleh seluruh Pokja Keuangan Badan Pangan Nasional.

4.3 Biro Organisasi Sumber Daya dan Hukum (OSH)

a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Daerah dan JF AKP di Wilayah Kalimantan Timur
- 2) Launching dan Sosialisasi MTQ VII KORPRI Tingkat Nasional 2024
- 3) Sosialisasi KAKPN
- 4) Koordinasi Webinar dan Pengukuhan KORPRI Badan Pangan Nasional
- 5) Rekomendasi Tunjangan Kinerja Bulan Agustus 2024
- 6) Pembahasan Perubahan Perbadan Kelas Jabatan
- 7) Reviu Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ke Portal Refomasi Birokrasi
- 8) Penyusunan Perubahan Perpres 66/2021 Pasca Perpres 83/2024

9) Proses Input Inventaris Data AKP/Kelas Jabatan AKP Nasional

10) Perubahan Kelembagaan Badan Pangan Nasional

b. Sumber Daya Manusia

Pada bulan Agustus melaksanakan kegiatan sebagai berikut;

- 1) Tindak Lanjut Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian Sistem Merit Badan Pangan Nasional
- 2) Penyusunan dokumen persiapan Pengadaan CPNS TA 2024
- 3) Rapat Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 lingkup Badan Pangan Nasional
- 4) Pelaksanaan Senam Pagi Bagi Pegawai Badan Pangan Nasional
- 5) Pengusulan kenaikan Pangkat Pegawai lingkup Badan Pangan Nasional
- 6) Pengusulan Kenaikan Jenjang Pegawai lingkup Badan Pangan Nasional

c. Layanan Hukum

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan Agustus 2024 sebagai berikut;

- 1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Penyusunan Naskah Perjanjian
- 3) Penyusunan Instrumen Hukum
- 4) Kegiatan JDIH
- 5) Pelaksanaan kegiatan Advokasi Hukum

4.4 Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

Pada bulan Agustus 2024, Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan) melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan prioritas, salah satunya adalah tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal ini, Pusdatin Pangan telah menyusun kebijakan dan draf pedoman pelaksanaan manajemen SPBE yang meliputi manajemen pengetahuan, perubahan, serta manajemen aset TIK. Penilaian mandiri SPBE juga telah dilakukan, dengan klaim indeks sebesar 4.3. Meskipun demikian, beberapa kegiatan dan koordinasi terkait layanan SPBE belum terlaksana.

Selanjutnya, dalam pengelolaan server Pusat Data Nasional, Pusdatin Pangan mencatat penggunaan sumber daya yang cukup tinggi. Untuk Server PDNS 1, penggunaan vCPU mencapai 80%, memory 93%, dan storage hampir penuh di angka 99%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas server perlu diperhatikan untuk menghindari potensi gangguan operasional. Selain itu, pada PDNS 2, pemulihan data pasca serangan ransomware juga menjadi fokus, di mana penambahan VM Backup Manager sedang dalam konfigurasi.

Aspek jaringan internet juga mendapatkan perhatian dalam monitoring ini. Traffik bandwidth selama bulan Agustus menunjukkan kinerja yang baik dengan koneksi yang terpantau stabil dan normal. Namun, terdapat beberapa serangan yang berhasil diblokir oleh sistem keamanan, termasuk 179 serangan dengan predikat tinggi. Penggunaan sistem firewall dan pengaturan keamanan lainnya berkontribusi pada perlindungan jaringan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan keamanan siber.

Terakhir, Pusdatin Pangan juga berfokus pada pengembangan aplikasi, terutama terkait Portal Satu Data Pangan. Progres pengembangan aplikasi mencapai 80% dan direncanakan untuk diluncurkan pada bulan September 2024. Rapat-rapat progres telah dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan infrastruktur dan dataset yang diperlukan. Meskipun terdapat tantangan dalam integrasi dan standar data, Pusdatin Pangan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang disediakan.

4.5 Inspektorat

Hasil monitoring kegiatan prioritas Inspektorat selama Bulan Agustus Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 2. Kegiatan fisik Layanan Audit Internal yang dilaksanakan Inspektorat yang mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada periode Bulan Agustus Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Kompilasi dan Analisis Lanjutan hasil revidi tagihan pembayaran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024

Sebagai rangkaian kegiatan pelaksanaan bantuan pangan Tahap I, Inspektorat melaksanakan kegiatan kompilasi dan analisis lanjutan yang dilaksanakan. Metode desk revidi yang digunakan yaitu menguji dokumen Berita acara serah terima (BAST) penerima bantuan pangan (PBP) untuk penyaluran bantuan pangan di 32 Provinsi.

Proses reviu membutuhkan waktu yang cukup signifikan karena banyaknya jumlah PBP yaitu 22.000.000,00. Dokumen reviu yang digunakan adalah dokumen PDF yang telah discan dan diunggah pada aplikasi Google Drive.

Tantangan yang dihadapi pereviu yakni terdapat beberapa dokumen pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan pangan yaitu BAST Utama, BAST Pengganti, BAST Perwakilan, dan SPTJM.

2) Narasumber Bimbingan Teknis Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS)

Sebagai upaya menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat Badan Pangan Nasional menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh unit teknis untuk membahas mengenai mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran khususnya yang terkait dana dekonsentrasi.

Pada kesempatan kali ini Inspektur menyampaikan titik kritis dan mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan GENIUS. Untuk memitigasi risiko, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Identifikasi Risiko: Kenali berbagai risiko yang mungkin muncul dalam proyek atau bisnis. Ini bisa meliputi risiko finansial, operasional, reputasi, dan lainnya.
- b. Analisis Risiko: Evaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Ini akan membantu menentukan mana yang perlu diperhatikan lebih serius.
- c. Rencana Tindakan: Buat rencana untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Ini bisa meliputi:
 - o Menghindari Risiko: Mengubah rencana untuk menghilangkan risiko.
 - o Mengurangi Risiko: Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko.
 - o Menerima Risiko: Menerima bahwa risiko tersebut mungkin terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
 - o Mengalihkan Risiko: Memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi.
- d. Implementasi: Laksanakan rencana mitigasi yang telah dibuat. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami peran mereka.
- e. Monitoring dan Review: Secara berkala tinjau dan monitor risiko yang ada serta efektivitas dari rencana mitigasi. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian.
- f. Pelatihan dan Komunikasi: Pastikan tim terlatih dan memiliki komunikasi yang baik untuk menghadapi risiko yang mungkin muncul.

3) Melaksanakan reviu laporan keuangan BUN satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Semester I Tahun 2024

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Semester I Tahun 2024 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2024, LRA, LO, LPE, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, Reviu ditujukan membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) , sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Dalam pelaksanaan reviu, Inspektorat telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, kami merekomendasikan kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara agar:

1. Memperbaiki Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
2. Melakukan Tutup Buku Pelaporan;
3. Melakukan Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) sebagaimana surat Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku KPA BUN Dana Penyelenggaraan CPP Nomor S-79/AG/2024 tanggal 2 April 2024.

4) Melaksanakan Rapat Pembahasan Pohon Kinerja

Pohon Kinerja adalah alat manajemen yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja suatu organisasi atau program. Konsep ini sering digunakan dalam perencanaan strategis dan pengukuran kinerja, terutama dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik.

5) Melaksanakan Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2024

Kegiatan yang dilaksanakan berupa evaluasi atas implementasi pelaksanaan AKIP dengan uraian sebagai berikut :

Evaluasi AKIP dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selanjutnya disampaikan bahwa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas implementasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP tingkat Badan Pangan Nasional diperoleh nilai sebesar **90,00** atau mendapat predikat **A (Memuaskan)**.

6) Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On Going) Badan Pangan Nasional Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024

7) Melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pangan Nasional

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan proses evaluasi dan penilaian terhadap infrastruktur TIK, aplikasi, dan sistem yang digunakan dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa teknologi mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam hal Audit TIK Inspektorat berkolaborasi dengan tim Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin) karena substansi teknis yang berkaitan dengan data berada pada unit kerja Pusdatin. Inspektorat melaksanakan audit pada tatakelola kebijakan. Hasil Audit TIK akan digunakan sebagai salah satu komponen penilaian Indeks SPBE.

8) Melaksanakan Reviu Usulan ABT ke-6 Badan Pangan Nasional TA. 2024

Tujuan Reviu adalah memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) mengenai keandalan dan keabsahan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke-6 Badan Pangan Nasional TA 2024 untuk pembayaran penyaluran Cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras tahap II Tahun 2023, kekurangan pembayaran penyaluran bantuan pangan beras tahap I Tahun 2023 dan kekurangan pembayaran kegiatan SPHP Beras Triwulan I s.d. III Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan dan penilaian terhadap usulan ABT ke-6 Badan Pangan Nasional. Metodologi reviu meliputi pengumpulan dan penelaahan atas dokumen rencana anggaran, serta wawancara dengan petugas/pejabat Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan dan Biro Perencanaan kerjasama dan Humas.

Hasil reviu terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan senilai Rp11.187.832.875.944,20 dapat disetujui untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Dokumen pendukung untuk pengajuan usulan belanja tambahan, secara umum telah lengkap dan memadai sesuai ketentuan dalam PMK No.62 Tahun 2023 dan telah disajikan secara memadai.

9) Melaksanakan Pembahasan Hasil Reviu dan Evaluasi Bantuan Pangan Tahap I Tahun 2024

Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024 dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden sesuai Risalah Rapat Internal tentang Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan Nomor R-0136/Seskab/ DKK/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan untuk pemberian bantuan pangan beras akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024 sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, dan menurunkan stunting.

Bantuan pangan berupa 10 kg beras diberikan kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

Jumlah penerima CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024 adalah sebanyak 22.004.077 PBP dengan kuantum penyaluran sebesar 220.040.770 kg per bulan atau seluruhnya sebesar 1.320.244.620 kg yang dialokasikan selama enam bulan mulai bulan Januari 2024 s.d. Juni 2024.

Hasil revidi atas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Jumlah yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran atas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024 alokasi bulan Februari 2024-Maret 2024 adalah sebesar Rp.XX (sebelum PPN biaya distribusi 1,1%) dengan kuantum penyaluran sebanyak XX kg.
- b. Jumlah yang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan pengajuan anggaran untuk pembayaran atas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024, alokasi Januari 2024, kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan sebelumnya melalui proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP.

10) Melaksanakan Revidi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan (BPK) RI

Tujuan Revidi adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan jenis masing-masing pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Bagian Keuangan Badan Pangan Nasional dan unit kerja terkait sebagai dasar untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Ruang lingkup revidi meliputi temuan BPK-RI yang bernilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023.

Metodologi Revidi dilakukan sebagai berikut:

- a. Revidi dilakukan melalui pengujian terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan melalui link Gdrive, dan melakukan perhitungan/exercise atas nilai pertanggungjawaban dengan menggunakan asumsi/justifikasi perevidi;
- b. Pelaksanaan revidi disupervisi secara berjenjang oleh Pengendali Teknis (Dalnis), dan Inspektur sebagai Penanggung jawab pengawasan.
 - c. Simpulan hasil revidi juga dikonfirmasi dengan Bagian Keuangan dan unit kerja terkait.
 - b. Adapun substansi hasil Revidi TL BPK tidak dapat disajikan dalam Laporan ini.

11) Melaksanakan Reviu Harga Pembelian Jagung (HPJ)

Kegiatan meliputi finalisasi dan konfirmasi atas permintaan Reviu Harga Pembelian Jagung. Tujuan reviu adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas terhadap kewajaran usulan Harga Pembelian Jagung (HPJ) Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2024 yang disampaikan oleh Perum BULOG sebagai dasar perhitungan harga satuan pada pembayaran kompensasi biaya penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah.

Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap asumsi, tarif dan perhitungan usulan revisi HPJ Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2024 yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya, serta klarifikasi/ permintaan penjelasan kepada Manajemen Perum BULOG. Kebenaran fisik, dan substansi dokumen pendukung usulan HPJ menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Simpulan reviu antara lain :

- a. Berdasarkan Surat Direktur Utama Perum BULOG kepada Kepala Badan Pangan Nasional Nomor B-718/II/DK101/KU.01.02/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perum BULOG mengajukan usulan HPJ Cadangan Jagung pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp6.270,00/kg di depan gudang BULOG di atas alat angkut berdasarkan asumsi kegiatan operasional penugasan jagung.
- b. Pada periode tahun 2024, Perum BULOG mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional yaitu melaksanakan pengadaan jagung pemerintah dari luar negeri sebanyak 250.000 ton dan pengadaan jagung dalam negeri sebanyak 25.581 ton. Dengan asumsi operasional berupa saldo awal sebanyak 151.054 kg, penyaluran SPHP sebanyak 363.518 ton, susut simpan 1.606 ton, sehingga persediaan akhir diperhitungkan sebanyak 61.511 ton.
- c. Komponen dalam struktur biaya HPJ belum seluruhnya didukung dengan kertas kerja dan kelengkapan dokumen pendukung yang diformalkan/ ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- d. Volume beberapa komponen biaya masih bersifat asumsi (rencana), didasarkan dari data hasil reviu HPJ sebelumnya dan berdasarkan rata-rata realisasi tahun terakhir. Terhadap dokumen tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dokumen pendukung yang diformalkan oleh pejabat yang berwenang.

- e. Hasil revidi terhadap asumsi operasional penugasan Tahun 2024 yang disampaikan oleh Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional
- 12) Melaksanakan supervisi penyaluran bantuan pangan, SPHP beras serta Cadangan Beras Pemerintah Cabang Surakarta

Berkaitan dengan adanya penyaluran bantuan pangan Tahap III oleh Bulog, Inspektorat melaksanakan supervisi penyaluran bantuan pangan, SPHP beras serta stok Cadangan beras Bulog Cabang Surakarta pada tanggal 21-23 Agustus 2024 dengan catatan sebagai berikut :

1. Wilayah kerja Bulog Kantor Cabang Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten terdiri dari Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri dan Surakarta.
2. Stok Beras per 20 Agustus 2024 untuk bulog cabang Surakarta terdiri dari 21.618,970 Kg beras yang terbagi dalam 8 (delapan) komplek pergudangan antara lain :
3. Berdasarkan data realisasi pengadaan Beras Dalam Negeri (DN) Kancab Surakarta telah menyerap Beras DN sejumlah 15.847 Ton (79,16 %) dari target 20.019 Ton.
4. Berdasarkan jumlah realisasi per tanggal 20 Agustus 2024 jumlah penyaluran bantuan pangan tahap III bulan agustus untuk Kancab Surakarta telah mencapai 100 % yang berarti beras untuk bantuan pangan telah sepenuhnya berpindah ke transporter (PT JPL) dari gudang bulog untuk di salurkan ke penerima bantuan pangan (PBP). Sedangkan data dari transporter per tanggal 21 Agustus 2024 untuk wilayah kerja kancab Surakarta rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten	Jumlah PBP	Realisasi Salur	Persentase
1	Boyolali	74.628	72.630	97.32 %
2	Karanganyar	73.872	72.851	98.62 %
3	Klaten	124.703	116.930	93.77 %
4	Surakarta	45.547	42.138	92.52 %
5	Sragen	73.202	71.598	97.81 %
6	Sukoharjo	72.386	71.106	98.23 %
7	Wonogiri	99.742	98.644	98.90 %



5. Untuk penyaluran beras SPHP di kancab Surakarta total realisasi penyaluran sampai dengan 21 Agustus 2024 sejumlah 15.930,73 Ton atau 75,43 % dari target penyaluran 21.120,00 Ton, dengan realisasi tersebut berdasarkan saluran pemasaran, penyaluran beras SPHP oleh pengecer merupakan yang paling banyak yaitu sejumlah 10.169,23 Ton , Distributor (3.319,90 Ton), Ritel Modern (1.340,80 Ton), Satgas (402,48 Ton), Pemerintah Daerah (370,97 Ton) dan RPK/TPK (326,35 Ton).
6. Supervisi dilanjutkan dengan mengunjungi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Kantor Kelurahan Kerten Kecamatan Jayengan. penerima bantuan pangan (PBP) di kelurahan tersebut berjumlah 494 orang. Penyaluran dilaksanakan oleh transporter PT JPL. Mekanisme penyaluran, PBP membawa KTP, KK (Fotocopy) serta undangan untuk kemudian diserahkan kepada petugas, setelah itu PBP membubuhi tandatangan pada daftar nominatif dan difoto KTP serta Wajah sebagai bukti penyerahan beras. Dalam kunjungan tersebut dilakukan juga pengecekan atas dokumen penyaluran seperti BAST daftar nominatif, BAST pengganti dan BAST Perwakilan yang jumlahnya masih belum sesuai. Adapun jika terdapat PBP yang tidak ada keluarahan tersebut mengganti data PBP berdasarkan data gakin wilayah kota Surakarta.
7. Kunjungan dilanjutkan dengan pemantauan SPHP Beras di Pasar Legi terhadap pedagang pasar yang menjadi mitra BULOG. Harga beli SPHP beras yaitu Rp55.000,00/Pack atau Rp11.000,00/Kg sedangkan untuk harga jual Rp58.000,00 masih dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp62.500. masih ditemukan pedagang beras yang membuka beras 5 Kg untuk dijual secara eceran (kiloan) dengan harga Rp13.000,00 diatas HET. Secara umum jumlah penyaluran SPHP Beras mengalami penurunan dibandingkan dengan awal tahun, penyebabnya antara lain naiknya HET beras SPHP, Stabilitasnya beras di pasaran serta adanya masyarakat yang memperoleh beras bantuan pangan.



8. Melaksanakan Audit Kinerja Satker Dekonsentrasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Substansi hasil audit bersifat terbatas.
9. Melaksanakan kompilasi dan konfirmasi dokumen pertanggungjawaban reviu bantuan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelesaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan reviu bantuan pangan Tahap I. Pelaksanaan kegiatan reviu bantuan pangan kurang lebih membutuhkan waktu 75 Hari dengan sifat penugasan reviu keluar kota (desk reviu maupun uji petik) sehingga perlu dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban, untuk memastikan administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB IV PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional periode bulan Agustus Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) kegiatan dengan 17 jenis KRO (ABR, AEA, AEC, AFA, BEC, BMA, EBA, EBB, EBC, EBD, PCA, PEH, RAG, QIA, QDD, QEA, QMA) dan 55 output/RO dengan pagu total berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional Revisi ke 13 Tahun 2024 sebesar Rp. 25.222.891.455.000,- yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen.
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp. 6.574.015.490.786,- dengan persentase realisasi sesuai pagu DIPA Revisi sebesar Rp. 26,09%. Sedangkan realisasi pada bulan September Tahun 2024 untuk satker Badan Pangan Nasional mencapai Rp. 6.086.071.987.615,- atau mencapai 24,15% dari pagu DIPA Revisi dan mencapai 24,36% % dari target bulan Agustus pagu DIPA Revisi atau setara Rp. 25.222.455.000,-
3. Realisasi fisik sampai bulan Agustus Tahun 2024 sesuai target pencapaian KRO dan Output/RO Tahun 2024 adalah:
 - a. ABR Kebijakan bidang pertanian dan pangan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan RO Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - b. AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Pelaporan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - c. AFA Norma Standar Prosedur dan Kriteria untuk RO NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan,
 - d. QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
4. Dinamika bantuan pangan pada bulan Agustus volume anggarannya meningkat dari Rp. 15.722.461.932.000 menjadi Rp. 25.222.891.455.000 dengan adanya penambahan ABT sebesar Rp. 9.500.429.523.000 yang dialokasikan untuk pembiayaan bantuan pangan untuk tahap II (Juli s.d September 2024).



4.2 Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional selama periode bulan Agustus Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan terkait rendahnya realisasi anggaran pada periode bulan Agustus yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pemblokiran anggaran pada DIPA induk Badan Pangan Nasional
- b. Adanya penambahan anggaran ABT pada DIPA Revisi ke-13 mengakibatkan pelaksanaan bantuan program dituntut untuk memenuhi regulasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga mengakibatkan terjadinya penambahan periode pelaksanaan pada tahap kegiatan sehingga target serapan pada bulan Agustus menjadi kecil yang berpengaruh terhadap rendahnya realisasi anggaran di bulan Agustus 2024
- c. Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) teknis dan administrasi yang terbatas terutama untuk satker urusan pangan pada level seksi/bidang menyebabkan tidak seimbangnya antara banyaknya beban pekerjaan dengan SDM yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atau rekomendasi atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan perencanaan secara profesional yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja
- b. Perlunya upaya percepatan pemenuhan dokumen administrasi kegiatan terutama satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi
- c. Perlunya peningkatan kompetensi SDM pelaksanaan kegiatan

LAMPIRAN

Lampiran 1.

DIPA Revisi ke-13: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



D6:4663-6253-1221-4707

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.428.037	15.128.567	386.894.752	15.215.428	17.179.089	24.405.766	22.830.342	6.143.630.539	38.376.749	8.657.733.558	26.602.246	9.869.466.382	25.222.891.455
		BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.315.637	48.599.711
		BELANJA BARANG	4.015.474	11.049.139	379.368.221	10.996.170	13.077.548	16.303.416	18.633.607	6.131.979.886	19.903.520	8.653.210.074	22.070.850	9.861.756.792	25.142.364.695
		BELANJA MODAL	48.746	694.730	329.122	181.612	292.313	485.667	400.713	8.131.010	14.953.587	1.003.842	1.011.754	4.393.953	31.927.049
		125.01.HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.209.515	2.101.172	371.762.286	3.256.375	3.047.063	5.257.199	3.025.171	6.118.413.207	19.223.568	8.636.123.587	4.611.377	9.837.768.257	25.006.798.781
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.194.386	2.065.456	371.571.896	3.196.890	3.000.043	5.022.302	2.944.264	6.116.329.254	4.676.942	8.635.547.799	4.074.056	9.837.122.881	24.987.747.981
		53 BELANJA MODAL	15.116	35.716	190.390	57.689	47.020	234.897	80.907	2.083.953	14.546.626	575.789	537.321	645.376	19.050.800
		125.01.HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	86.451	2.005.328	2.657.745	1.992.225	1.846.956	3.981.675	6.836.502	4.675.851	4.689.186	7.374.967	6.585.221	10.033.513	52.765.620
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	84.605	1.969.931	2.603.362	1.978.268	1.823.240	3.956.753	6.772.174	4.579.744	4.611.314	7.194.280	6.425.744	9.859.756	51.859.170
		53 BELANJA MODAL	1.846	35.397	54.384	13.957	23.716	24.922	64.328	96.107	77.872	180.687	159.477	173.758	906.450
		125.01.HA.6877 Pemantapan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	855.006	2.972.430	1.348.511	1.641.118	3.428.866	3.128.726	3.407.354	10.217.241	4.243.897	4.563.397	4.747.568	9.802.722	50.356.836
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	834.198	2.889.480	1.315.549	1.599.370	3.322.095	3.033.621	3.283.720	4.369.261	4.091.813	4.407.601	4.532.465	7.642.663	41.321.836
		53 BELANJA MODAL	20.808	82.950	32.962	41.748	106.771	95.105	123.634	5.847.980	152.084	155.796	215.103	2.160.059	9.035.000
		125.01.WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.277.066	8.049.637	11.126.209	8.325.706	8.856.203	12.038.167	9.561.315	10.324.240	10.220.097	9.671.606	10.658.080	11.861.891	112.970.218
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.315.637	48.599.711

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Agustus Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI
Kementerian Keuangan

URAIAN	TARGET		REALISASI			
	PAGU NON BLOKIR REVISI KE-13	AGUSTUS (24,36%)	AGUSTUS	s.d AGUSTUS	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	25.200.760.369.000	6.144.296.358.438	6.086.071.987.615	6.574.015.490.786	26,09%	25.200.760.368.996
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.090.377.089.000	6.116.776.813.333	6.077.442.927.869	6.505.152.127.144	25,93%	18.585.224.961.856
HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	24.998.506.503.000	6.091.656.183.052	6.063.674.544.583	6.454.333.329.949	25,82%	18.544.173.173.051
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.080.798.000	994.082.393	335.980.780	2.921.802.986	71,60%	1.158.995.014
ABR.001 Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	235.492.505	61.602.321	756.405.301	78,24%	210.312.699
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	272.607.888	28.401.300	889.189.122	79,46%	229.890.878
ABR.003 Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.995.000.000	485.982.000	245.977.159	1.276.208.563	63,97%	718.791.437
AEA Koordinasi	15.868.048.000	4.544.875.894	1.720.558.894	10.108.914.435	63,71%	5.759.133.565
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	99.108.660	69.817.290	298.738.770	73,43%	108.111.230
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	7.267.323.000	1.770.319.883	1.412.889.151	5.193.157.182	71,46%	2.074.165.818
AEA.003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.193.875.000	2.675.447.351	237.852.453	4.617.018.483	56,35%	3.576.856.517
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000	706.774.950	484.681.023	2.235.980.054	77,07%	665.394.946
AFA.001 NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	121.647.750	115.493.100	453.809.673	90,88%	45.565.327
AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	317.167.200	30.315.000	1.175.086.837	90,25%	126.913.163
AFA.003 NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	267.960.000	338.872.923	607.083.544	55,19%	492.916.456
BEC Bantuan Produk	24.935.632.477.000	6.074.320.071.397	6.058.872.011.073	6.424.545.628.946	25,76%	18.511.086.848.054
BEC.001 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	24.935.632.477.000	6.074.320.071.397	6.058.872.011.073	6.424.545.628.946	25,76%	18.511.086.848.054
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000	365.400.000	106.608.856	522.680.716	34,85%	977.319.284
QDD.001 Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	365.400.000	106.608.856	522.680.716	34,85%	977.319.284
QMA Data dan Informasi Publik	20.073.805.000	6.230.558.418	2.141.143.700	13.984.762.555	69,67%	6.089.042.445
QMA.001 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	6.374.585.000	2.210.568.906	311.772.200	4.524.860.927	70,98%	1.849.724.073
QMA.002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12.117.140.000	3.634.594.824	1.795.246.500	8.262.520.378	68,19%	3.854.619.622
QMA.003 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	385.394.688	34.125.000	1.197.381.250	75,68%	384.698.750
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000	4.494.420.000	13.560.257	13.560.257	0,07%	18.436.439.743
RAG.001 Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	4.007.220.000	13.560.257	13.560.257	0,08%	16.436.439.743
RAG.002 Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	487.200.000	0	0	0,00%	2.000.000.000
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	47.588.014.000	12.853.705.032	8.822.902.194	29.091.305.204	61,13%	18.496.708.796
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000	2.764.860.000	1.609.018.955	5.657.592.026	72,90%	2.103.604.974
ABR.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	1.004.362.800	163.559.712	2.041.315.514	65,36%	1.081.684.486
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	1.760.497.200	1.445.459.243	3.616.276.512	77,97%	1.021.920.488
AEA Koordinasi	18.706.217.000	4.700.266.872	2.080.777.277	7.155.271.417	38,25%	11.550.945.583
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	1.388.520.000	409.044.990	1.984.781.804	38,83%	3.126.415.196
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	13.595.020.000	3.311.746.872	1.671.732.287	5.170.489.613	38,03%	8.424.530.387

AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	978.450.000	238.350.420	30.897.748	562.727.409	57,51%	415.722.591
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	97.440.000	30.897.748	282.601.494	70,65%	117.398.506
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	578.450.000	140.910.420	0	280.125.915	48,43%	298.324.085
QEA	Bantuan Masyarakat	17.851.550.000	4.533.773.580	4.955.824.545	14.945.264.059	83,72%	2.906.285.941
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	13.765.000.000	3.538.290.000	4.716.223.045	13.041.898.459	94,75%	723.101.541
QEA.002	Bantuan Pangan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	995.483.580	239.601.500	1.903.365.600	46,58%	2.183.184.400
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	616.454.160	146.383.669	770.450.293	33,64%	1.520.149.707
QMA.UU	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	310.590.000	100.401.597	571.747.721	55,24%	463.252.279
QMA.UU	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	305.864.160	45.982.072	198.702.572	15,83%	1.056.897.428
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	44.282.572.000	12.266.925.250	4.945.481.092	21.727.491.991	49,07%	22.555.080.009
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.200.400.000	608.610.240	319.708.870	902.450.879	41,01%	1.297.949.121
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	152.000.000	73.080.000	45.000.000	45.000.000	29,61%	107.000.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.048.400.000	535.530.240	274.708.870	857.450.879	41,86%	1.190.949.121
AEA	Koordinasi	22.919.912.000	5.969.859.160	3.115.290.327	14.943.764.612	65,20%	7.976.147.388
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.922.818.000	2.119.987.951	439.786.574	5.364.042.134	67,70%	2.558.775.866
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	10.521.222.000	2.745.669.679	2.285.789.583	6.813.451.460	64,76%	3.707.770.540
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.475.872.000	1.104.201.529	389.714.170	2.766.271.018	61,80%	1.709.600.982
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.065.000.000	548.100.000	110.989.882	816.914.614	39,56%	1.248.085.386
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	465.000.000	158.340.000	0	66.410.000	14,28%	398.590.000
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	341.040.000	101.989.882	616.187.716	44,01%	783.812.284
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	48.720.000	9.000.000	134.316.898	67,16%	65.683.102
PCA	Perizinan Produk	1.516.475.000	417.043.200	227.087.853	895.542.957	59,05%	620.932.043
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.516.475.000	417.043.200	227.087.853	895.542.957	59,05%	620.932.043
PEH	Promosi	4.130.000.000	1.228.718.400	518.748.120	2.065.983.753	50,02%	2.064.016.247
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.130.000.000	1.228.718.400	518.748.120	2.065.983.753	50,02%	2.064.016.247
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.940.000.000	552.972.000	356.015.462	780.128.603	40,21%	1.159.871.397
QDD.UU	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.940.000.000	552.972.000	356.015.462	780.128.603	40,21%	1.159.871.397
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000	553.660.170	284.402.279	1.227.883.621	54,02%	1.044.941.379
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	553.660.170	284.402.279	1.227.883.621	54,02%	1.044.941.379
QMA	Data dan Informasi Publik	992.660.000	355.656.000	13.238.299	88.259.160	8,89%	904.400.840
QMA.UU	Data Situasi Konsumsi Pangan	992.660.000	355.656.000	13.238.299	88.259.160	8,89%	904.400.840
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.245.300.000	2.032.306.080	0	6.563.792	0,11%	6.238.736.208
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.245.300.000	2.032.306.080	0	6.563.792	0,11%	6.238.736.208

W A	Program Dukungan Manajemen	110.383.280.000	27.519.545.105	8.629.059.746	68.863.363.642	62,39%	41.519.916.358
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	110.383.280.000	27.519.545.105	8.629.059.746	68.863.363.642	62,39%	41.519.916.358
AEC	Kerja sama	2.824.972.000	706.440.000	265.581.364	1.557.903.448	55,15%	1.267.068.552
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.824.972.000	706.440.000	265.581.364	1.557.903.448	55,15%	1.267.068.552
BMA	Data dan Informasi Publik	4.949.943.000	1.278.432.288	397.888.921	2.765.528.715	55,87%	2.184.414.285
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	4.949.943.000	1.278.432.288	397.888.921	2.765.528.715	55,87%	2.184.414.285
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	83.427.742.000	20.415.087.521	6.684.403.357	54.942.673.672	65,86%	28.485.068.328
EBA.956	Layanan BMN	672.000.000	175.392.000	62.720.418	442.217.510	65,81%	229.782.490
EBA.957	Layanan Hukum	1.591.900.000	414.120.000	56.391.230	698.008.610	43,85%	893.891.390
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.422.000.000	852.600.000	343.635.465	2.071.307.613	60,53%	1.350.692.387
EBA.959	Layanan Protokoler	921.000.000	237.510.000	6.888.676	495.500.351	53,80%	425.499.649
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	243.600.000	31.050.000	544.589.244	57,33%	405.410.756
EBA.962	Layanan Umum	11.715.694.000	2.863.671.468	1.113.682.485	7.132.360.317	60,88%	4.583.333.683
EBA.994	Layanan Perkantoran	64.155.148.000	15.628.194.053	5.070.035.083	43.558.690.027	67,90%	20.596.457.973
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	644.400.000	469.271.040	0	602.600.000	93,51%	41.800.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	644.400.000	469.271.040	0	602.600.000	93,51%	41.800.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.400.336.000	876.960.000	390.137.812	1.897.698.677	55,81%	1.502.637.323
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.400.336.000	876.960.000	390.137.812	1.897.698.677	55,81%	1.502.637.323
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.135.887.000	3.773.354.256	891.048.292	7.096.959.130	46,89%	8.038.927.870
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.778.583.000	1.443.076.656	454.748.701	2.885.943.152	49,94%	2.892.639.848
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	243.600.000	0	506.075.010	50,61%	493.924.990
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	477.943.200	211.508.935	1.198.292.805	61,08%	763.707.195
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.395.304.000	1.608.734.400	224.790.656	2.506.648.163	39,20%	3.888.655.837